BADAN POM

RENCANA STRATEGIS

Tahun 2025-2029

Balai Besar POM di Gorontalo

Balai POM di Gorontalo @bpom.gorontalo @bpom_gto 0811-4355-155

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO
Jl. Prof. Dr. Ing. B.J.Habibie (Eks Jl. Tengah) Toto Selatan, Bone Bolango - Gorontalo
Telp. (0435) 822052, 08114355155 ; Fax : (0435) 822052
Email : bpom_gorontalo@pom.go.id ; ulpk_gorontallo@yahoo.co.id ;
website : www.gorontalo.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI GORONTALO
NOMOR HK.02.02.23A.12.25.129 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI GORONTALO TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI GORONTALO

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Gorontalo tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR POM DI GORONTALO TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR POM DI GORONTALO TAHUN 2025-2029.
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar POM di Gorontalo Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar POM di Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kedua	:	Renstra Balai Besar POM di Gorontalo memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Gorontalo untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Ketiga	:	Renstra Balai Besar POM di Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai: a. acuan bagi Balai Besar POM di Gorontalo dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Gorontalo.
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal : 5 Desember 2025
KEPALA BALAI BESAR POM DI GORONTALO,

LINTANG PURBA JAYA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Dalam konteks globalisasi dan percepatan arus perdagangan bebas, pengawasan terhadap obat dan makanan di Provinsi Gorontalo menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sebagai provinsi yang sedang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, Gorontalo mengalami peningkatan peredaran produk obat dan makanan, baik melalui jalur formal maupun informal. Kemajuan teknologi informasi dan perdagangan online turut memperbesar potensi masuknya produk tanpa izin edar atau produk ilegal ke wilayah ini, sehingga menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan responsif.

Letak geografis Provinsi Gorontalo yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, ditambah dengan karakteristik wilayah yang terdiri dari lima kabupaten dan satu kota, beberapa di antaranya sulit dijangkau, menambah tantangan dalam proses pengawasan. Keberadaan pelabuhan laut dan bandara sebagai pintu utama distribusi barang mengharuskan Balai Besar POM di Gorontalo untuk meningkatkan intensitas pengawasan guna memastikan hanya produk yang memenuhi ketentuan yang beredar di masyarakat.

Selain itu, pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor pangan olahan dan obat tradisional di Gorontalo menunjukkan tren positif, namun di sisi lain menimbulkan kebutuhan untuk memberikan pendampingan dan edukasi yang lebih intensif. Banyak pelaku usaha yang masih terbatas pemahamannya terhadap standar keamanan produk dan regulasi yang berlaku, sehingga memerlukan pengawasan sekaligus pembinaan berkelanjutan. Budaya konsumsi masyarakat yang khas juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam strategi pengawasan.

Keberadaan Balai Besar POM di Gorontalo menjadi sangat strategis dalam menjawab berbagai tantangan tersebut. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM, Balai Besar POM di Gorontalo bertugas untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Peran ini semakin relevan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk yang aman dan bermutu. Melalui pendekatan pengawasan penuh (full spectrum monitoring) mulai dari pra-pasar hingga pasca-

pasar, serta pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, BBPOM di Gorontalo berupaya membangun sistem pengawasan yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Gorontalo merupakan unit pelaksana teknis di bawah Badan POM Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Provinsi Gorontalo. BBPOM di Gorontalo bertugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam melaksanakan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan Rencana, Program, dan Anggaran
- Pelaksanaan Pemeriksaan Fasilitas Produksi Bahan Obat dan Makanan
- Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan
- Pelaksanaan Pengujian Laboratorium
- Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
- Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

Selain fungsi-fungsi di atas, BBPOM di Gorontalo juga aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keamanan obat dan makanan, serta berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM, untuk meningkatkan kualitas produk lokal.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, menjadikan Balai POM di Gorontalo menjadi Balai Besar POM di Gorontalo yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM (satuan kerja bersifat mandiri) yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Susunan organisasi BBPOM di Gorontalo terdiri atas:

1. Kepala Balai Besar POM di Gorontalo
2. Kepala Bagian Tata Usaha, dan

3. Kelompok jabatan fungsional

Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi BBPOM di Gorontalo didukung dengan bagan organisasi yang terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Gorontalo

- Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggan dan administrasi penjaminan mutu.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas ketua tim dan anggota tim.

I.1.1 Capaian Balai Besar POM di Gorontalo pada Periode Renstra 2020-2024

Pada tahun 2019, BBPOM di Gorontalo memulai langkah strategis untuk memperkuat pondasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayahnya. Salah satu capaian signifikan adalah peningkatan inspeksi lapangan secara intensif terhadap produk-produk yang beredar di pasaran,

baik itu makanan, obat-obatan, kosmetik, maupun suplemen kesehatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan mutu produk yang dikonsumsi masyarakat. Hasilnya, Balai POM berhasil menindak sejumlah produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mengedukasi pelaku usaha agar mematuhi regulasi yang berlaku.

Selain pengawasan, tahun 2019 juga ditandai dengan penguatan peran Balai POM dalam pemberdayaan masyarakat. Program "Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman" (Germas Pangan Aman) diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan. Program ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk sekolah, komunitas lokal, dan pemerintah daerah, untuk menciptakan budaya sadar pangan aman sejak dini.

BBPOM di Gorontalo juga menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Melalui program bimbingan teknis, pelaku UMKM diberikan pelatihan tentang proses produksi yang higienis, tata cara pendaftaran produk, dan pemenuhan persyaratan standar keamanan pangan. Program ini bertujuan untuk membantu UMKM meningkatkan daya saing produk mereka di pasar lokal maupun nasional.

Di sisi lain, tahun 2019 menjadi tahun yang penting dalam membangun sinergi antara Balai POM dengan pemerintah daerah. Kerja sama ini difokuskan pada penyusunan kebijakan yang mendukung pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam kerangka ini, Balai POM berperan aktif memberikan masukan dalam penyusunan regulasi daerah yang berorientasi pada perlindungan konsumen.

Secara keseluruhan, tahun 2019 menjadi tonggak penting bagi BBPOM di Gorontalo dalam memperkuat kapabilitas pengawasan, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan mendukung pertumbuhan UMKM. Capaian ini menjadi landasan yang kokoh untuk berbagai program inovatif yang dijalankan di tahun-tahun berikutnya.

Sepanjang tahun 2020-2024 BBPOM di Gorontalo telah menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan persentase capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja sasaran program BBPOM di Gorontalo yang selalu memenuhi ekspektasi setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Capaian Kinerja BBPOM di Gorontalo Tahun 2020-2024

No	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2019)	Tahun														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT																	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94	80,8	84,99	105,19	85	97,41	114,6	87	88,69	101,94	89	89,91	101,02	91	94,12	103,43
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	71	78	88,21	113,09	88	84,08	95,55	89,5	89,77	100,3	91	88,45	97,2	92,5	88,7	95,89
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	85	80,65	94,88	87	96,43	110,84	88	83,74	95,16	89	92,75	104,22	93	96,28	103,53
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	80	60,22	75,28	82	50	60,98	82,2	89,13	108,43	82,4	89,02	108,04	89,5	84,44	94,35
5	Persentase pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	0				88	82,86	94,16	89	98,61	110,8	90	100	111,11	92	94,67	102,9
SS 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT																	
1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang bermutu	66	70	79,7	113,86	82	78,01	95,13	84	83,13	98,96	87	85,89	98,72	89	83,48	93,8
SS 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di masing –masing wilayah kerja UPT																	
1	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	83	84,53	101,84	85,6	96,5	112,73	86,7	97,8	112,8	87,7	96,3	109,81	96,5	96,37	99,87
2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	74	62,7	84,73	64,3	77,43	120	66,35	81,73	123,18	68,18	79,35	116,38	80	82,1	102,63

3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	89	91,47	102,78	92	94,52	102,74	93	93,66	100,71	94	97,12	103,32	97,5	98,48	101,01
SS 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT																	
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	0	87	101,28	116,41	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	0	85,6	77,24	90,23	77	85,37	110,87	80	91	113,75	82	86,17	105,08	86,5	93	107,51
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	98,04	115,34	98	100	102,04	99	99,73	100,74	99	100	101,01	100	100	100
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	49,8	50	45,83	91,66	55	53,33	96,96	60	60,42	100,7	65	65,91	101,4	70	69,57	99,39
5	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	46	60	60,32	100,53	63	67,87	107,73	66	66,14	100,21	68	68,22	100,32	71	75,6	106,48
6	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	3,51	3,96	112,82	4,11	3,83	93,19	4,26	3,98	93,43	4,4	4,81	109,32	4,9	4,95	101,02
7	Persentase UMKM yang memenuhi standar Standar Produksi Pangan Olahan dan/ atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	0							77	90	116,88	79	100	126,58	100	100	100
8	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0													95	100	105,26
SS 5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT																	
1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	92,97	97,12	104,46	97	97,85	100,88	98	95	96,94	98,5	98,9	100,41	99,8	99,88	100,08

2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0	16	17	106,25	40	40	100	52	52	100	64	64	100	76	78	102,63
3	Jumlah desa pangan aman	0	5	6	120	12	12	100	18	18	100	25	25	100	31	31	100
4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0	1	1	100	2	2	100	3	3	100	4	4	100	6	6	100
SS. 6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT																	
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	95	95,22	100,23	100	100	100	100	100	106,44	100	100	100	100	100	100
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	95	100	105,26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SS 7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT																	
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	50	79	56,9	72,03	81	84,5	104,32	82	112	136,59	82	120	146,34	100	100	100
SS. 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal																	
1	Indeks RB UPT	0	91	85,62	94,09	79,7	79,73	100,04	80,7	92,81	115,01	81,7	94,67	115,88	95,67	91,96	96,12
2	Nilai AKIP UPT	81	80	77,8	97,25	79,8	78,2	97,99	81,8	78,61	96,1	83,8	78,99	94,26	82,62	79,13	95,78
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	0													88,77	92,26	103,93
SS. 9 Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal																	
1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	75	83,51	111,35	83,5	81,3	97,37	84	80,83	96,23	84,5	90,08	106,6	86,45	87,31	100,99
SS. 10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan																	
1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	100	70	72	102,86	76	71,7	94,34	81	81,5	100,62	86	86,3	100,35	87,34	88,94	101,83
2	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	1,51	1,7	112,58	2	0,85	42,5	2,25	2,55	113,33	2,5	2,75	110	3	2,88	96
SS. 11 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel																	
1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	93	80,27	86,3	90	87,31	97,01	90,6	90,84	100,26	91,8	90,1	98,15	90,3	90,77	100,52

2	Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran UPT	0	89	100	112,36	90	100	111,11	0								
3	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0													97,52	85	87,16
4	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0													78	98,6	126,41
5	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0													60	52,8	88

a. Tahun 2020

Pada tahun 2020, BBPOM di Gorontalo mencatat salah satu capaian penting, yaitu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Penghargaan ini merupakan wujud nyata komitmen Balai POM dalam meningkatkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas di sektor pelayanan publik. Predikat WBK diberikan kepada unit kerja pemerintah yang mampu menciptakan lingkungan kerja bersih dari praktik korupsi serta memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Selain itu, di tahun yang sama, Balai POM terus memperkuat peran pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Gorontalo. Berbagai inspeksi lapangan dilakukan untuk memastikan produk-produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat sesuai peraturan perundang-undangan. Upaya ini dilakukan dengan menjalin koordinasi erat bersama pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. BBPOM di Gorontalo juga mendapatkan penghargaan TOP 21 Inovasi Pelayanan Publik di Masa Pandemik COVID-19 secara nasional, dengan judul Inovasi pembuatan Handsanitizer dari Minuman Cap Tikus.

b. Tahun 2021

Pada 2021, BBPOM di Gorontalo melanjutkan langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Salah satu inovasi utama adalah peningkatan keterlibatan masyarakat melalui program penyuluhan keamanan pangan. Melalui program ini, Balai POM berhasil menjangkau ribuan masyarakat, termasuk pelaku UMKM, untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya penggunaan bahan baku yang aman, proses produksi higienis, serta perlunya pendaftaran produk ke BPOM. Laporan kinerja Balai POM di tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal efektivitas pengawasan, terutama pada sektor produk pangan olahan. Balai POM juga mendukung percepatan perizinan usaha bagi UMKM di Gorontalo yang ingin memasarkan produknya secara lebih luas. Kerja sama ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pengawasan dan pemberdayaan.

c. Tahun 2022

Di tahun 2022, BBPOM di Gorontalo menguatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Gorontalo. Fokus utama kolaborasi ini adalah mendukung pelaku UMKM agar mampu meningkatkan standar mutu produk mereka sehingga dapat bersaing di pasar lokal maupun nasional. Salah satu contoh sukses dari program ini adalah pendampingan terhadap UMKM Helco Melati, yang menghasilkan minyak kelapa berkualitas tinggi. Selain mendukung UMKM, BBPOM di Gorontalo juga memperketat pengawasan terhadap produk-produk berisiko tinggi seperti kosmetik dan obat tradisional. Melalui operasi pasar, tim Balai POM berhasil mengamankan sejumlah produk ilegal yang tidak memenuhi standar. Langkah ini dilakukan untuk melindungi konsumen dari potensi bahaya.

d. Tahun 2023

Pada 2023, BBPOM di Gorontalo mencatat berbagai pencapaian strategis. Salah satu yang menonjol adalah peningkatan jumlah UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikasi izin edar BPOM. Hal ini menunjukkan keberhasilan program pendampingan dan edukasi yang terus ditingkatkan setiap tahunnya. Balai POM juga memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses pendaftaran produk dan memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Di sisi pengawasan, BBPOM di Gorontalo berhasil menindaklanjuti laporan masyarakat terkait peredaran produk-produk ilegal dan membahayakan. Dengan tindakan cepat dan tegas, berbagai barang yang melanggar aturan berhasil ditarik dari pasaran. Selain itu, sosialisasi intensif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membaca label produk sebelum membeli.

e. Tahun 2024

Memasuki tahun 2024, BBPOM di Gorontalo terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diterbitkan pada April dan Mei menunjukkan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

yang diberikan. Hal ini tidak terlepas dari berbagai inovasi pelayanan publik, seperti peluncuran layanan digital dan hotline pengaduan yang responsif.

Pada Akhir tahun 2024, BBPOM di Gorontalo mencatatkan sejarah baru dengan berhasil meraih predikat **Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)** dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Predikat ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Balai POM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.

Capaian ini merupakan langkah lanjutan dari keberhasilan sebelumnya saat Balai POM Gorontalo meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020. Selama empat tahun terakhir, Balai POM secara konsisten memperkuat sistem kerja, melibatkan masyarakat dalam pengawasan, serta meningkatkan aksesibilitas layanan melalui inovasi berbasis teknologi digital.

Selain itu, Balai POM tetap berkomitmen memberdayakan UMKM melalui program-program pelatihan dan pendampingan. Fokus tahun ini adalah membantu pelaku usaha mengembangkan produk inovatif dengan tetap mengutamakan aspek keamanan dan mutu. Di sisi lain, Balai POM juga memperluas jangkauan pengawasannya hingga ke wilayah pelosok, memastikan seluruh masyarakat Gorontalo mendapatkan akses terhadap produk yang aman dan bermutu.

Realisasi Indikator Kinerja Utama BBPOM di Gorontalo Tahun 2020-2024 menyajikan evaluasi terhadap berbagai indikator utama yang menjadi fokus dalam Rencana Strategis (Renstra) Unit Pelaksana Teknis (UPT). Indikator tersebut mencakup persentase kepatuhan obat dan makanan terhadap standar keamanan dan mutu, efektivitas pengawasan distribusi dan produksi, serta keberhasilan dalam penindakan pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, laporan ini juga mengukur tingkat kesadaran masyarakat, kepuasan pelaku usaha, efektivitas komunikasi dan edukasi, serta kinerja tata kelola organisasi yang meliputi pengelolaan anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai capaian dari setiap program dan kegiatan dalam rangka memastikan

akuntabilitas serta transparansi pelaksanaan tugas di masing-masing wilayah kerja.

Secara keseluruhan, data dalam laporan ini mencerminkan progres yang dicapai dalam setiap indikator dari tahun ke tahun, dengan adanya target yang ditetapkan dan realisasi yang diukur secara berkala. Beberapa indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan, seperti persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat, efektivitas komunikasi, serta tingkat kepuasan masyarakat dan pelaku usaha.

Selain itu, jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir nilai kinerja BBPOM di Gorontalo periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, BPOM selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya.

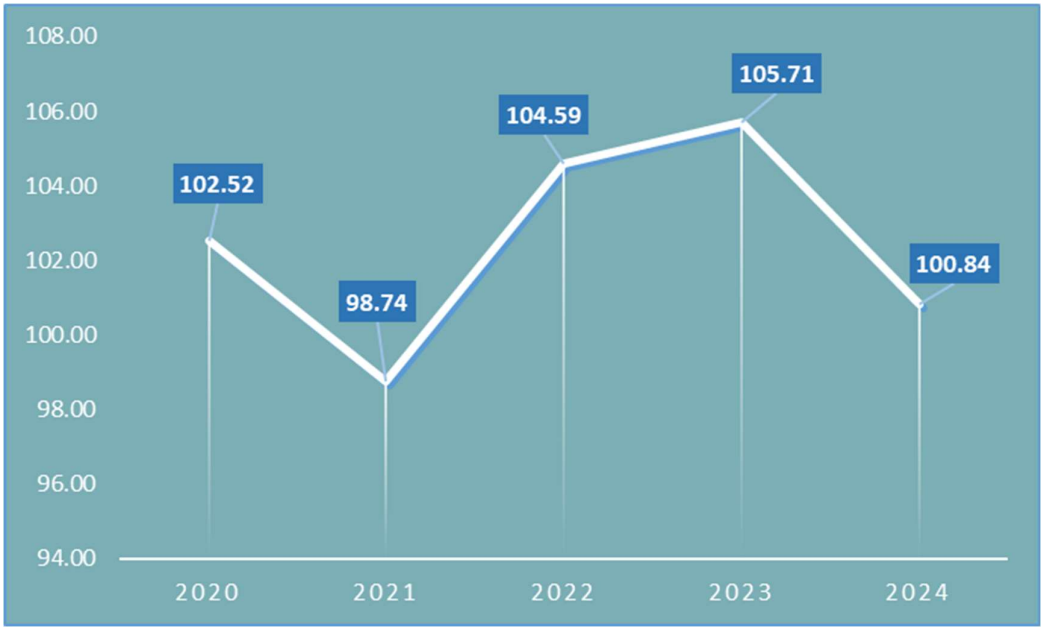

Gambar 1.2 Nilai Kinerja BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

BBPOM di Gorontalo memiliki 11 Sasaran Kegiatan dan 28 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

   Capaian persentase obat yang memenuhi syarat menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2020 target ditetapkan sebesar 80,8%, realisasi berhasil melampaui target dengan mencapai 84,99%. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2021 dengan capaian 97,41%, meskipun targetnya hanya 85%. Pada tahun-tahun berikutnya, capaian terus meningkat dengan angka yang konsisten, mencapai 94.12% pada 2024. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pengawasan mutu obat yang dilakukan secara berkelanjutan.

Gambar 1.3 Tren Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

   Pada tahun 2020, capaian persentase makanan yang memenuhi syarat melampaui target (88,21% dari target 78%). Namun, pada tahun 2021 realisasi turun menjadi 84,08%, di bawah target 88%. Upaya perbaikan terlihat di tahun 2022 sampai 2024, di mana realisasi kembali sesuai atau melampaui target, dengan capaian sebesar 88,7% pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya penguatan kontrol kualitas yang lebih efektif dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 1.4 Tren Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

   Indikator ini dimulai dengan baseline 0% pada 2019. Capaian di tahun 2020 sedikit di bawah target (80,65% dari target 85%). Namun, tahun 2021 mencatat lonjakan signifikan dengan realisasi 96,43%. Meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022 (83,74%), kinerja ini kembali meningkat pada 2023 dan mencapai target sempurna 96,28% di 2024. Hal ini menunjukkan efektivitas pengawasan obat yang semakin baik.

Gambar 1.5 Tren Persentase Makanan yang Bermutu BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

   Capaian awal pada tahun 2020 dan 2021 cukup rendah, dengan hanya 60,22% dan 50% dari target yang ditetapkan. Namun, upaya signifikan dilakukan pada

tahun-tahun berikutnya, sehingga pada 2022 dan 2023 capaian melebihi target dengan angka 89,13% dan 89,02%. Pada tahun 2024, target berhasil dicapai dengan realisasi 84,44%. Tren ini mencerminkan perbaikan signifikan dalam pengawasan makanan.

Gambar 1.6 Tren Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

   Indikator ini tidak memiliki data realisasi pada tahun 2020, tetapi pada tahun 2021 capaian mencapai 82,86% dari target 88%. Tahun 2022 mencatat peningkatan signifikan dengan capaian 98,61%, bahkan mencapai 100% pada 2023. Pada tahun 2024, target kembali dicapai dengan angka 94,67%. Hal ini menegaskan efektivitas program fortifikasi pangan yang dijalankan.

Gambar 1.7 Tren Persentase Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

SK 2: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Masing–Masing Wilayah Kerja UPT

1. Indeks Kesadaran Masyarakat *(Awareness Index)*

   Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan merupakan program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah sebagai regulator tapi pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Disisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Obat dan Makanan yang berkualitas. SS2 memiliki tren capaian kinerja yang fluktuatif yaitu 113,86% di tahun 2020; 95,13% di tahun 2021; 98,96% di tahun 2022; 98,72% di tahun 2023; dan 93,80% di tahun 2024. SS2 diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2021, Indeks kesadaran masyarakat mengalami peningkatan yang stabil dari tahun 2021 sampai tahun 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2020, realisasi mencapai 79,7% melampaui target 70%.

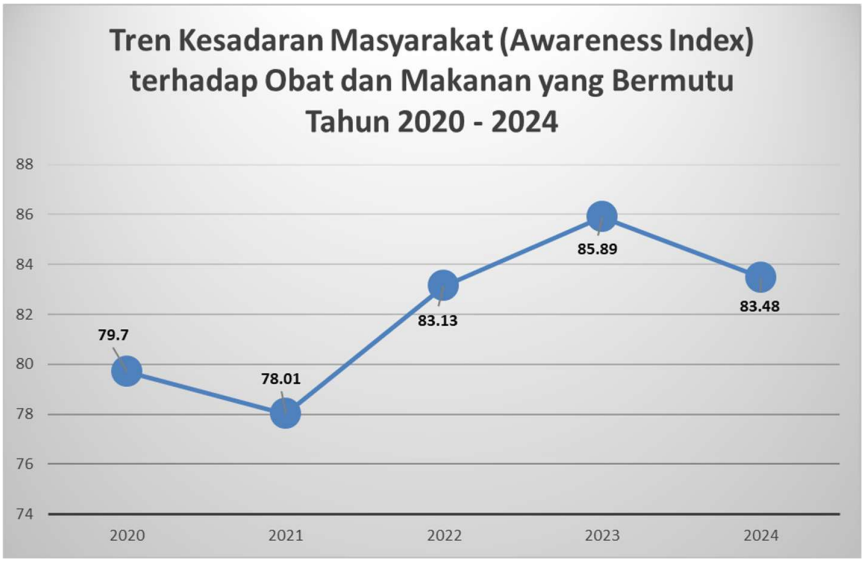

Gambar 1.8 Tren Indeks Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

Fluktuasi capaian ini mengindikasikan bahwa meskipun secara umum kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan dan mutu obat serta makanan cenderung meningkat, masih terdapat tantangan dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program edukasi. Kemungkinan penyebabnya mencakup jangkauan KIE yang tidak merata sampai ke pelosok, pendekatan KIE yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan perilaku masyarakat, keterbatasan inovasi dalam penyampaian pesan, serta kurangnya segmentasi target audiens yang tepat.

Untuk itu, ke depan dibutuhkan strategi yang lebih inovatif, termasuk optimalisasi media digital, pelibatan komunitas dan tokoh masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor untuk memperluas jangkauan dan efektivitas pesan KIE. Selain itu, penting bagi UPT untuk melakukan pemetaan wilayah dan kelompok masyarakat dengan tingkat kesadaran rendah agar intervensi dapat lebih terfokus dan berdampak maksimal. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan capaian Indeks Kesadaran Masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

SK 3: Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Masing–Masing Wilayah Kerja UPT

1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Bimbingan dan Pembinaan

   Indeks kepuasan pelaku usaha menunjukkan tren positif sepanjang periode pengukuran. Pada tahun 2020, capaian mencapai 84,53%, melebihi target 83%. Tren positif ini berlanjut hingga 2024, dengan capaian puncak sebesar 96,37%, yang mencerminkan efektivitas program bimbingan dan pembinaan bagi pelaku usaha

Gambar 1.9 Tren Persentase Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Bimbingan dan Pembinaan BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

   Indikator ini mengalami tantangan di tahun 2020, dengan capaian hanya 62,7% dari target 74%. Namun, perbaikan signifikan terjadi pada tahun-tahun berikutnya, dengan realisasi yang semakin mendekati target, dan akhirnya mencapai target 82,1% pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pengawasan.

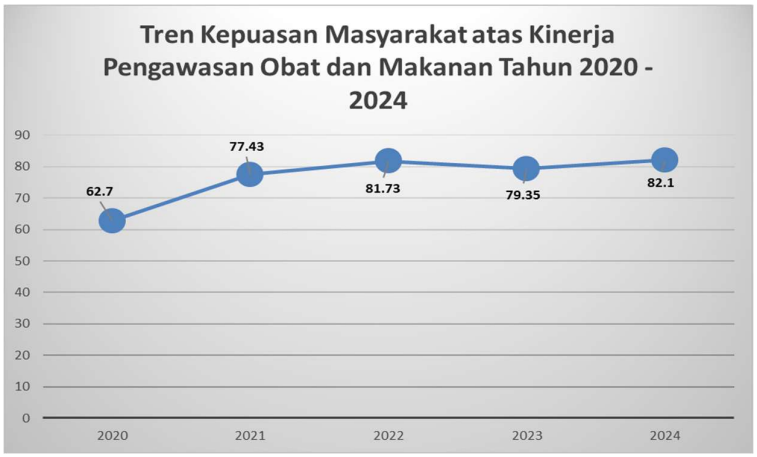

Gambar 1.10 Tren Persentase Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Gorontalo Tahun 2020-2024

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

   Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM

mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Gorontalo memiliki tren capaian kinerja yang fluktuatif yaitu 102,78% di tahun 2020; 102,74% di tahun 2021; 100,71% di tahun 2022; 103,32% di tahun 2023; dan 101,01 % di tahun 2024.

Tren realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Gorontalo sendiri menunjukkan tren yang semakin meningkat sejak Tahun 2020-2024 dengan realisasi tertinggi pada Tahun 2024 sebesar 98,48%

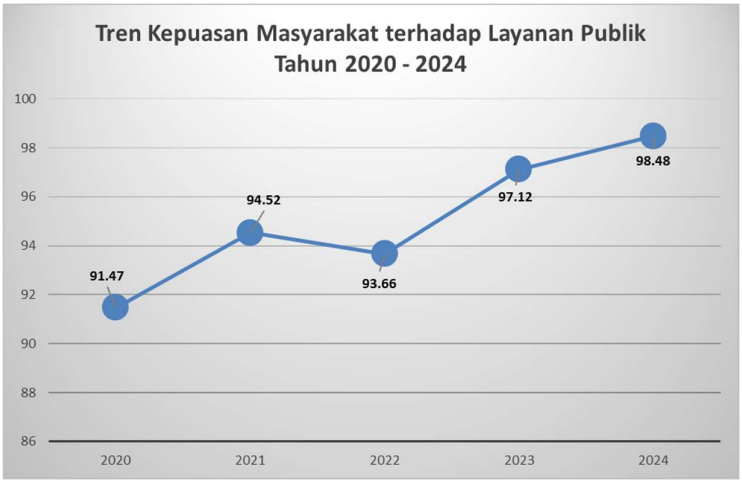

Gambar 1.11 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Gorontalo Tahun 2020–2024

Hal ini menunjukkan hasil yang linear sejalan dengan upaya BBPOM di Gorontalo untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari capaian Indeks Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima sejak Tahun 2023. Pembangunan Zona Integritas juga sangat mendukung kepuasan masyarakat melalui penerapan berbagai inovasi pelayanan publik yang ditandai dengan raihan sebagai Unit Kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Tahun 2024.

Capain tersebut menjadi tantangan bagi BBPOM di Gorontalo ke depannya untuk terus meningkatkan dan mengembangkan berbagai upaya dan inovasi untuk memastikan pelayanan publik yang diberikan dapat memenuhi harapan dan keinginan pengguna layanan.

SK 4: Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Masing-masing Wilayah Kerja UPT

Secara umum, indikator dalam Sasaran Kegiatan (SS) 4 menunjukkan tren positif dan peningkatan signifikan di hampir semua aspek. Beberapa indikator seperti Keputusan Inspeksi, Penilaian Sertifikasi Tepat Waktu, dan Kepuasan Publik berhasil mencapai angka maksimal. Meski demikian, beberapa indikator memerlukan perhatian khusus untuk menjaga konsistensi capaian di tahun-tahun mendatang. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam pengawasan sarana produksi dan distribusi, serta pelayanan publik yang semakin optimal di lingkungan UPT

1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

   Indikator ini berhasil mencapai target dengan sangat baik sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, capaian melampaui target dengan angka **101,28%** dari target **87%**. Di tahun-tahun berikutnya, realisasi mencapai **100%** setiap tahun, menunjukkan efektivitas inspeksi yang dijalankan sesuai dengan prosedur operasional yang ditetapkan, Kinerja ini mencerminkan stabilitas dan konsistensi dalam pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Hal ini juga menunjukkan kesiapan tim inspeksi dalam melaksanakan tugas dengan standar tinggi.

Gambar 1.12 Tren Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

   Persentase tindak lanjut hasil inspeksi oleh pemangku kepentingan mengalami peningkatan bertahap meskipun sempat mengalami sedikit stagnasi. Pada tahun 2020, capaian **85,37%** sedikit di bawah target **85,6%**, namun meningkat signifikan di tahun 2022 dengan realisasi mencapai **91%** dari target **80%**. Hingga tahun 2024, capaian mencapai **93%**, sesuai dengan target yang ditetapkan.

   Indikator ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti hasil inspeksi. Perlu upaya lebih lanjut untuk menjaga stabilitas capaian ini agar konsisten melampaui target setiap tahun.

Gambar 1.13 Tren Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan BBPOM di Gorontalo Tahun 2020-2024

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

   Indikator ini menunjukkan performa yang sangat baik dengan capaian yang selalu memenuhi dan bahkan melampaui target dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi mencapai **98,04%** dari target **85%**. Puncaknya pada tahun 2021, 2023, dan 2024, di mana capaian mencapai **100%** setiap tahunnya, Penyelesaian penilaian sertifikasi yang tepat waktu mencerminkan efisiensi dalam proses administrasi dan penerapan standar operasional yang konsisten. Kinerja ini patut dipertahankan di masa mendatang.

Gambar 1.14 Tren Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

   Indikator ini menunjukkan peningkatan bertahap setiap tahunnya meskipun sempat stagnan di tahun 2021 dengan realisasi **53,33%**. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian **60,42%**, dan terus meningkat hingga mencapai target **70%** di tahun 2024, Peningkatan ini menandakan adanya penguatan pengawasan dan bimbingan kepada sarana produksi obat dan makanan. Namun, perlu upaya lebih lanjut untuk memastikan tren peningkatan tetap stabil di masa mendatang.

Gambar 1.15 Tren Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

   Indikator ini menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2020. Pada tahun tersebut, capaian mencapai **60,32%** dari target **60%**. Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi **67,87%**, dan akhirnya mencapai **75,6%** di tahun 2024, sesuai dengan target yang ditetapkan, Tren ini menunjukkan efektivitas pengawasan sarana distribusi obat dan makanan. Kinerja yang konsisten ini mencerminkan implementasi pengawasan yang berjalan dengan baik dan efektif.

Gambar 1.16 Tren Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

6. Indeks Pelayanan Publik UPT

   Indeks pelayanan publik UPT mengalami peningkatan bertahap selama periode pengukuran. Tahun 2020 mencatat capaian **3,96** dari target **3,51**, menunjukkan kinerja yang baik. Meskipun sedikit turun pada tahun 2021 dan 2022 dengan capaian **3,83** dan **3,98**, perbaikan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan angka **4,81**. Pada tahun 2024, target berhasil dicapai sempurna di angka **5,0.**

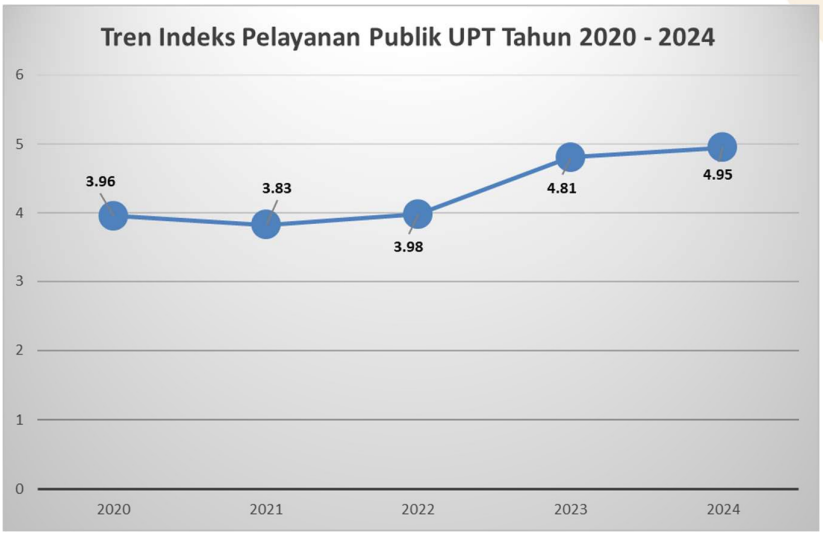

Gambar 1.17 Tren Indeks Pelayanan Publik UPT BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

7. Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

   Data untuk indikator ini mulai tersedia pada tahun 2022 dengan capaian yang melampaui target. Pada tahun tersebut, target sebesar **77%** berhasil direalisasikan hingga **90%**. Tren ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024 dengan capaian sempurna **100%** di kedua tahun tersebut, Capaian ini menegaskan keberhasilan pembinaan dan pendampingan UMKM dalam menerapkan standar produksi yang baik. Konsistensi ini menjadi indikasi positif bagi keberlanjutan kualitas produk UMKM di sektor pangan, obat, dan kosmetik.

Gambar 1.18 Tren UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik BBPOM di Gorontalo Tahun 2022 - 2024

8. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

   Indikator ini mulai diukur pada tahun 2024 dengan capaian yang memenuhi target sebesar **95%**. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan UPT dalam program-program strategis di bidang kesehatan telah berjalan dengan baik Capaian ini menunjukkan komitmen UPT untuk berperan aktif dalam program kesehatan di tingkat daerah. Efektivitas koordinasi dengan pihak terkait menjadi kunci keberhasilan indikator ini.

SK 5: Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Masing-masing Wilayah Kerja UPT

Secara keseluruhan, indikator dalam Sasaran Kegiatan 5 menunjukkan tren yang sangat positif dengan semua target berhasil dicapai setiap tahunnya. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program komunikasi, informasi, dan edukasi yang dijalankan UPT. Fokus pada keamanan pangan di sekolah, desa, dan pasar juga menunjukkan komitmen UPT dalam melibatkan berbagai lapisan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pangan yang aman dan sehat.

Program edukasi dan kolaborasi yang kuat menjadi kunci utama keberhasilan SS 5. Dengan mempertahankan tren ini, UPT dapat terus meningkatkan

kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap keamanan pangan dan obat-obatan.

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

   Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) mengenai obat dan makanan menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, realisasi mencapai **97,12%** melampaui target sebesar **92,97%**. Capaian terus meningkat hingga tahun 2024, di mana target **99,8%** berhasil dicapai. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan UPT dalam menyampaikan informasi yang relevan dan efektif kepada masyarakat.

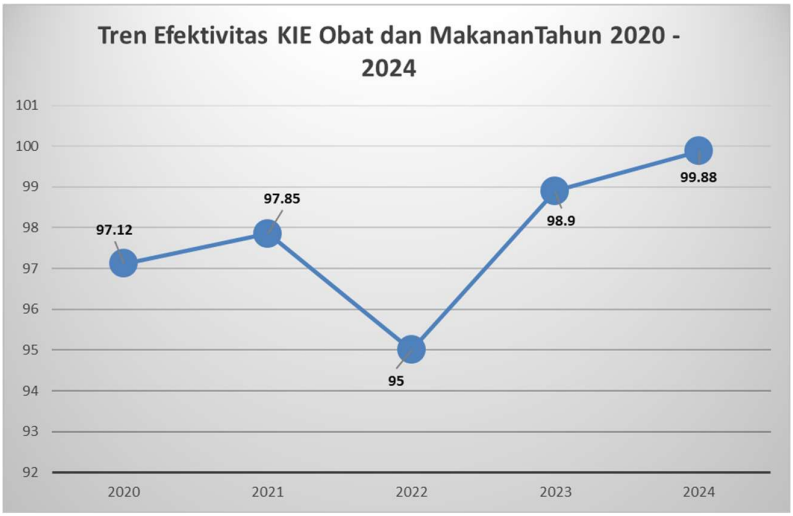

Gambar 1.19 Tren Efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

   Indikator ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memastikan keamanan pangan di lingkungan sekolah. Pada tahun 2020, target **16 sekolah** berhasil dicapai dengan capaian **17 sekolah**. Jumlah sekolah dengan PJAS aman terus meningkat setiap tahun hingga mencapai **78 sekolah** di tahun 2024, sesuai dengan target yang ditetapkan, Kenaikan jumlah sekolah dengan PJAS aman menunjukkan keberhasilan implementasi program pengawasan pangan di sekolah. Hal ini mencerminkan perhatian UPT terhadap kesehatan anak-anak di lingkungan Pendidikan.

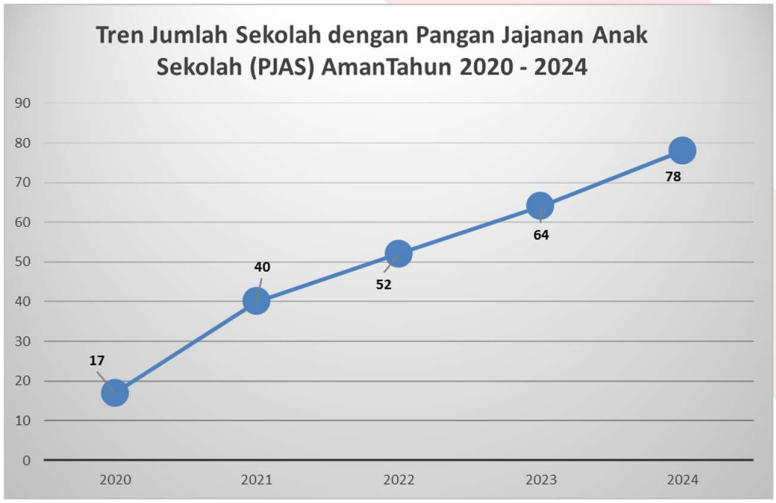

Gambar 1.20 Tren Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Capaian jumlah desa pangan aman mengalami peningkatan yang signifikan selama periode pengukuran. Pada tahun 2020, target **5 desa** tercapai dengan realisasi yang sesuai. Tren ini terus berlanjut hingga mencapai **31 desa** di tahun 2024, sesuai dengan target yang ditetapkan, Pertumbuhan jumlah desa pangan aman menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pangan yang sehat dan aman. Program ini juga mencerminkan kolaborasi yang baik antara UPT dan komunitas lokal.

Gambar 1.21 Tren Jumlah Desa Pangan Aman BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

4. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

   Indikator ini menunjukkan peningkatan yang stabil dalam memastikan keamanan pasar dari bahan berbahaya. Pada tahun 2020, capaian **1 pasar** sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah pasar aman terus meningkat hingga mencapai **6 pasar** pada tahun 2024 sesuai dengan target, Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan pengawasan dan edukasi kepada pedagang pasar tentang pentingnya memastikan produk yang dijual bebas dari bahan berbahaya. Hal ini juga menunjukkan penguatan regulasi dan inspeksi di pasar-pasar tradisional.

Gambar 1.22 Tren Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

SK 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Indikator sasaran ini meliputi Persentase sampel Obat dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Kinerja capaian pada indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik dan stabil sepanjang 2020 hingga 2024. Untuk **sampel Obat**, capaian tahun 2020 adalah **95,22%** dari target, meningkat menjadi **100%** di 2021, dan mencapai **100% konsisten pada 2022 hingga 2024**. Sementara itu, untuk **sampel Makanan**, capaian tahun 2020 adalah **100%**, lalu stabil **100% hingga 2024**.

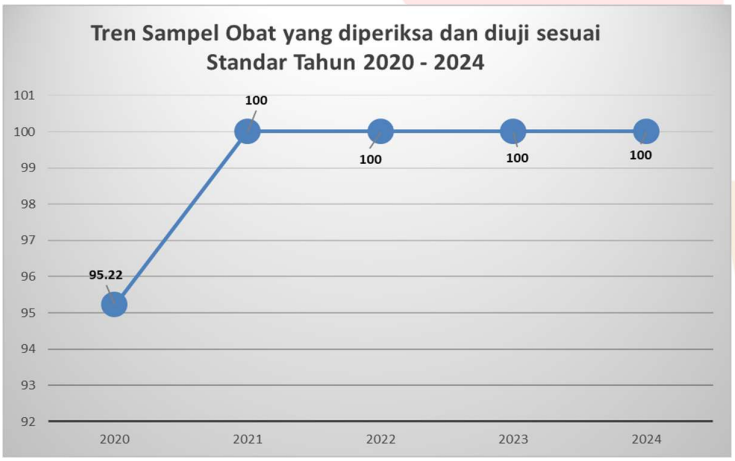

Gambar 1.23 Tren Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai Standar Tahun 2020 - 2024

Hal ini menandakan bahwa proses pengambilan, pemeriksaan, dan pengujian sampel oleh laboratorium BBPOM di Gorontalo telah dilakukan secara sistematis dan akurat. Capaian yang tinggi mencerminkan komitmen terhadap penerapan standar laboratorium seperti *Good Laboratory Practices (GLP)* dan standar mutu pengujian sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 24 Tahun 2016. Di daerah seperti Gorontalo, keberhasilan ini sangat signifikan karena menjadi benteng awal dalam mencegah peredaran produk yang tidak aman melalui pengujian komprehensif terhadap sampel dari pasar, apotek, dan fasilitas produksi lokal. Keberhasilan ini dicapai karena adanya komitmen organisasi dalam memenuhi fasilitas, sarana prasarana, kompetensi, dan kemampuan pengujian di laboratorium sehingga dapat melakukan pengujian parameter sesuai standar yang ditetapkan dalam Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku.

Gambar 1.24 Tren Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 – 2024

SK 7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan.

Gambar 1.25 Tren Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Gorontalo Tahun 2020 – 2024

Pada tahun 2020, capaian hanya **56,90%**, namun meningkat signifikan menjadi **84,5% di 2021**, kemudian **112% di 2022**, **120% di 2023**, dan **stabil di 100% pada 2024**.

Dalam lima tahun terakhir (2020–2024), efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM Gorontalo menunjukkan tren peningkatan signifikan. Awalnya, capaian sempat rendah akibat keterbatasan SDM dan dampak pandemi COVID-19. Namun, melalui penguatan kapasitas penyidik, sinergi lintas sektor, serta penerapan pendekatan berbasis risiko dan teknologi, kinerja penindakan terus membaik.

Pemanfaatan data intelijen, pelibatan masyarakat, dan peningkatan kompetensi penyidik turut mendorong capaian yang lebih stabil dan responsif. Secara keseluruhan, sistem pengawasan dan penegakan hukum di BBPOM Gorontalo kini berjalan lebih sistematis, adaptif, dan mampu menjadi simpul koordinasi dalam penanganan kejahatan Obat dan Makanan di daerah.

Capaian ini mencerminkan bahwa sistem penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan semakin kuat, dengan koordinasi lintas sektor dan dukungan penegakan hukum yang semakin efektif. Penindakan ini termasuk operasi penertiban terhadap produk ilegal, kosmetik palsu, suplemen tidak terdaftar, dan penyalahgunaan bahan berbahaya, yang relevan dengan kondisi Gorontalo sebagai wilayah distribusi lintas provinsi. Peningkatan capaian ini diperkuat dengan regulasi seperti Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dan penguatan koordinasi penegakan hukum bersama Polri, Kejaksaan, serta Dinas Kesehatan setempat. Meskipun efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di BBPOM Gorontalo terus menunjukkan tren peningkatan, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Salah satunya adalah penguatan koordinasi lintas sektor dalam kerangka *criminal justice system* (CJS). Koordinasi dengan aparat penegak hukum telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan forum teknis yang lebih rutin dan terstruktur seperti FGD, pertemuan operasional, dan evaluasi penyidikan.

Selain itu, keterbatasan jumlah PPNS menjadi hambatan signifikan. Dengan wilayah pengawasan yang luas dan beban perkara yang cukup tinggi, kebutuhan akan penambahan personel sangat mendesak. Pelatihan pembentukan PPNS baru menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya tindak di lapangan.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas teknis dan profesionalisme penyidik juga menjadi perhatian. Kompleksitas modus pelanggaran menuntut penyidik

memiliki kemampuan yang terus diperbarui, baik dalam aspek teknis penyidikan maupun pemanfaatan data intelijen dan digitalisasi pelaporan. Tantangan-tantangan ini menjadi perhatian dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan efektivitas penindakan di masa mendatang.

SK 8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Indikatornya mencakup Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Nilai AKIP, dan Nilai Pengelolaan Kearsipan. Indeks RB UPT menunjukkan capaian sebesar **85,62% di 2020**, mencapai **94,67% di 2023**, lalu **96,12% pada 2024**. Nilai AKIP UPT juga naik dari **77,80% di 2020** menjadi **78,2% di 2021**, dan meningkat hingga **79,13% pada tahun 2024**. Nilai Pengelolaan Kearsipan naik pada tahun 2024 mencapai 92,26%.

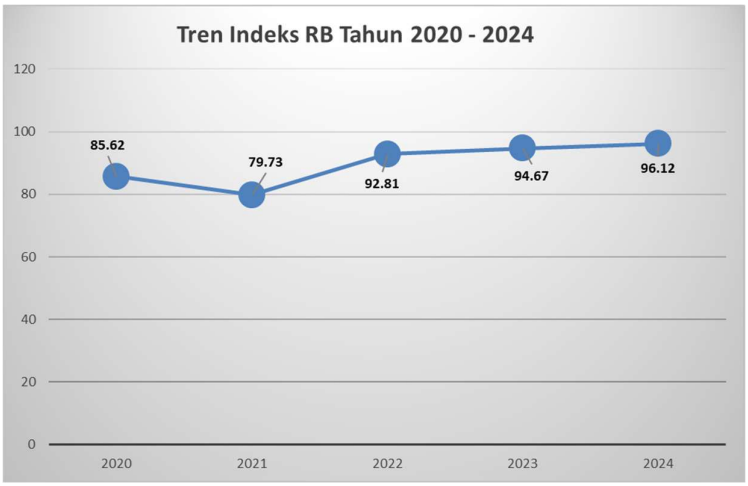

Gambar 1.26 Tren Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

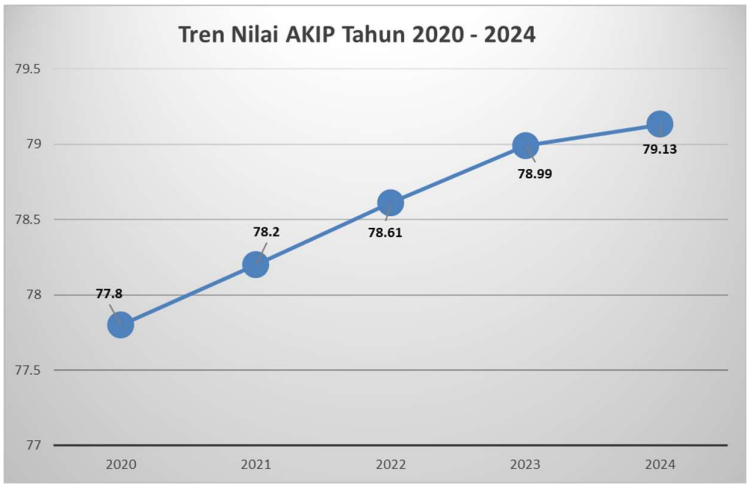

Gambar 1.27 Tren Nilai AKIP BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

Hal ini menunjukkan tata kelola instansi yang semakin matang dan akuntabel, terutama dalam pelaporan kinerja, efisiensi birokrasi, dan pengelolaan arsip sesuai ketentuan ANRI dan Kemenpan-RB. Capaian ini juga menunjukkan konsistensi BBPOM di Gorontalo dalam melaksanakan evaluasi kinerja internal, penyusunan laporan keuangan berbasis kinerja, dan pengelolaan dokumen administrasi yang tertib.

SK 9: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Indikatornya adalah Indeks Profesionalitas ASN UPT. Capaian meningkat dari **83,51% di 2020** menurun menjadi **81,3% di 2021**, sedikit menurun namun kembali meningkat menjadi **90,08% di 2023**, dan menurun menjadi **87,31% pada 2024**. Penurunan capaian tersebut disebabkan oleh variabel perhitungan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

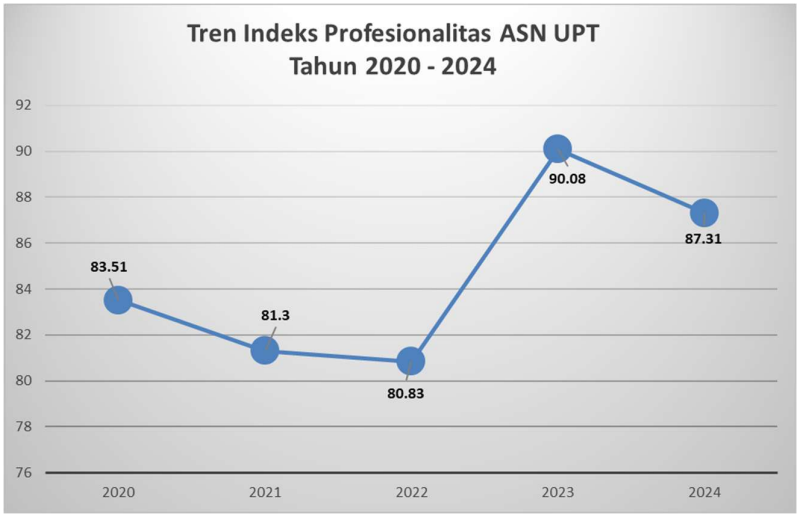

Gambar 1.28 Tren Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

Pencapaian ini menunjukkan bahwa BBPOM di Gorontalo mampu mengembangkan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, pelaksanaan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang konsisten, serta penerapan sistem merit dalam penilaian kinerja. Hal ini mendukung pencapaian target nasional dalam pembangunan ASN yang berintegritas dan profesional sebagaimana diatur oleh Kementerian PAN-RB dan BKN.

SK 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Terdapat dua indikator: Persentase pemenuhan laboratorium pengujian sesuai GLP serta Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal. Untuk indikator pertama, capaian meningkat dari **72% di 2020** menjadi **102,86% di 2021**, dan terus naik ke **100,62% di 2023**, serta **101,83% pada 2024**. Sedangkan pada indikator kedua, Indeks pengelolaan data tumbuh dari **1,70 (112,58%) di 2020** ke **2,55 (113,33%) di 2022**, dan mencapai **2,88 (96%) di 2024**.

Gambar 1.29 Tren Pemenuhan Laboratorium Pengujian sesuai GLP BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

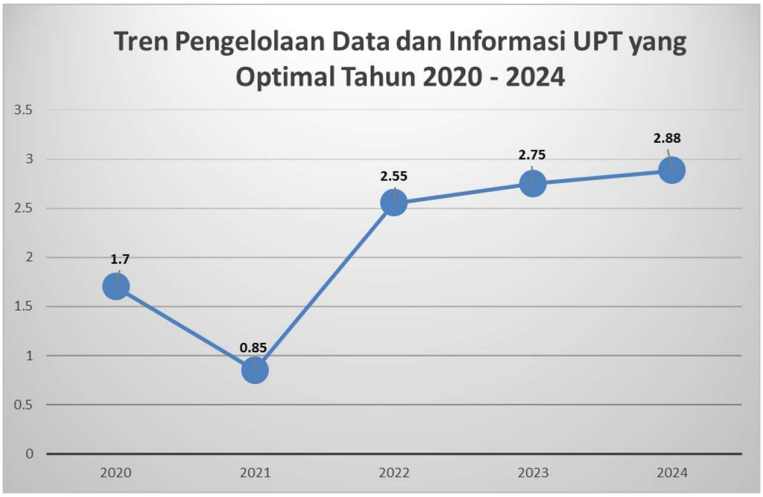

Gambar 1.30 Tren Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

Peningkatan ini menunjukkan penguatan sistem pelaporan, integrasi sistem informasi pengawasan, serta penguatan kapasitas laboratorium untuk memenuhi tuntutan standar nasional dan internasional. Ini juga memperlihatkan dukungan dari Renstra Badan POM 2020–2024 dalam hal digitalisasi layanan pengawasan dan pelaporan melalui sistem seperti SIMONA, e-Monev, dan SIMPEL.

SK 11: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Sasaran ini memiliki empat indikator utama:

1. Nilai Kinerja Anggaran UPT: meningkat dari **80,27% di 2020**, menjadi **87,31% di 2021**, **90,84% di 2022**, **90,1% di 2023**, dan **90,77% pada 2024**.

Gambar 1.31 Tren Nilai Kinerja Anggaran UPT BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2024

2. Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran UPT hanya ada di tahun 2020 dan 2021

Gambar 1.32 Tren Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Gorontalo Tahun 2020 - 2021

3. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan realisasi **85%** selama 2024
4. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN realisasi **98,6%** selama 2024
5. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan realiasi **52,8%** selama 2024

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan pengelolaan keuangan dan aset negara yang akuntabel, efisien, dan mendukung penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan arahan Inpres No. 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMKM dalam belanja pemerintah. Capaian tinggi pada seluruh indikator ini menandakan bahwa BBPOM di Gorontalo telah mampu menjalankan tata kelola organisasi secara akuntabel, efektif, dan adaptif terhadap tuntutan regulasi nasional, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional dan berbasis hasil.

Aspirasi/Ekspektasi Masyarakat terkait Kinerja BBPOM di Gorontalo

BBPOM di Gorontalo memiliki peran penting dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan, mutu, dan efektivitas produk yang beredar di masyarakat. Capaian kinerja dalam periode 2019–2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan di berbagai indikator utama, meskipun beberapa tantangan masih perlu diatasi.

Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh BBPOM di Gorontalo telah menjadi agenda rutin tahunan. Forum ini bukan sekadar acara seremonial, tetapi merupakan wadah penting untuk menyampaikan berbagai masukan, keluhan, dan saran dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pelayanan BPOM.

Melalui forum ini, BPOM Gorontalo berupaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat setiap tahun, FKP selalu menghadirkan berbagai pihak, mulai dari perwakilan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga media. Mereka diajak untuk berdialog secara terbuka mengenai berbagai isu penting terkait pelayanan publik, seperti proses

penerbitan izin edar produk, transparansi biaya layanan, waktu penyelesaian pengurusan izin, serta efektivitas pengawasan produk di pasaran.

BBPOM di Gorontalo telah berhasil menangkap berbagai aspirasi dari masyarakat. Salah satu fokus utama yang sering muncul adalah pentingnya peningkatan sosialisasi terkait persyaratan perizinan produk obat dan makanan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain itu, masyarakat juga mengharapkan kemudahan akses terhadap informasi mengenai biaya dan waktu layanan yang lebih transparan. FKP tidak hanya menjadi forum untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga sebagai sarana edukasi. Melalui sesi dialog dan diskusi, masyarakat dapat memahami tugas dan fungsi BPOM, serta hak-hak yang mereka miliki sebagai pengguna layanan. Hasil diskusi dari forum ini tidak berhenti pada perbincangan semata, tetapi ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang dipantau setiap tahunnya.

BBPOM di Gorontalo juga memanfaatkan forum ini untuk membangun sinergi dengan berbagai pihak. Salah satu contohnya adalah kerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) Kabupaten Bone Bolango yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan publik di Mal Pelayanan Publik. Kerja sama seperti ini diharapkan dapat mempermudah proses perizinan dan pengawasan produk di tingkat daerah. Melalui FKP yang diadakan setiap tahun, BBPOM di Gorontalo semakin memahami ekspektasi masyarakat dan terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya. Masukan dari masyarakat selalu menjadi dasar dalam penyusunan rencana aksi yang konkret dan terukur. Tidak hanya itu, forum ini juga menjadi tolok ukur untuk menilai sejauh mana kebijakan dan layanan BPOM telah memenuhi harapan publik.

Konsistensi dalam penyelenggaraan FKP mencerminkan komitmen BBPOM di Gorontalo untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Dengan terus mendengar dan merespons masukan dari masyarakat, diharapkan BBPOM di Gorontalo dapat menghadirkan layanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih mudah diakses oleh semua pihak. Forum ini bukan hanya sekadar dialog tahunan, tetapi juga sebuah langkah nyata untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih inklusif dan terpercaya di Provinsi Gorontalo.

Sebagai salah satu unsur penting pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, publik memiliki peran yang sangat signifikan sebagai subjek dan sasaran dalam program pengawasan tersebut. Sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat melalui penggunaan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas, serta kompetitif. Dari sudut pandang yang berbeda, publik juga memiliki kontribusi krusial dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan bertindak sebagai konsumen cerdas agar terhindar dari Obat dan Makanan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Untuk itu, keinginan masyarakat harus menjadi perhatian utama BBPOM di Gorontalo dalam perumusan program pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. BBPOM di Gorontalo mengumpulkan masukan dan harapan masyarakat lewat Survei Kepuasan Masyarakat, Simpel LPK maupun evaluasi kegiatan KIE yang dilakukan selama Tahun 2024.

Berdasarkan temuan data tersebut, telah dilakukan analisis kualitatif terhadap data umpan balik yang diberikan oleh masyarakat. Berikut adalah analisis *wordcloud* yang menampilkan masukan dan rekomendasi dari masyarakat disampaikan oleh masyarakat telah dilakukan.

Gambar 1.33 Analisis *wordcloud*

Beberapa frasa yang sering muncul antara lain “Penyalahgunaan Obat”, “Izin Edar”, “Kosmetik TIE”, “Integritas” dan “Pengujian Obat dan Makanan”,

beberapa frasa lain dapat dilihat pada gambar diatas. Seluruh saran dan masukan masyarakat juga telah di klasterisasi dan diperoleh data bahwa responden mayoritas memberikan masukan agar BPOM melakukan Pengawasan dan pemberantasan penyalahgunaan obat baik secara luring maupun daring, peredaran kosmetik TIE juga menjadi perhatian masyarakat. Di samping itu peran BBPOM di Gorontalo juga diharapkan dalm rangka pendampingan pengurusan Izin Edar Produk Obat dan Makanan khusunya yang diproduksi oleh UMKM di Provinsi Gorontalo.

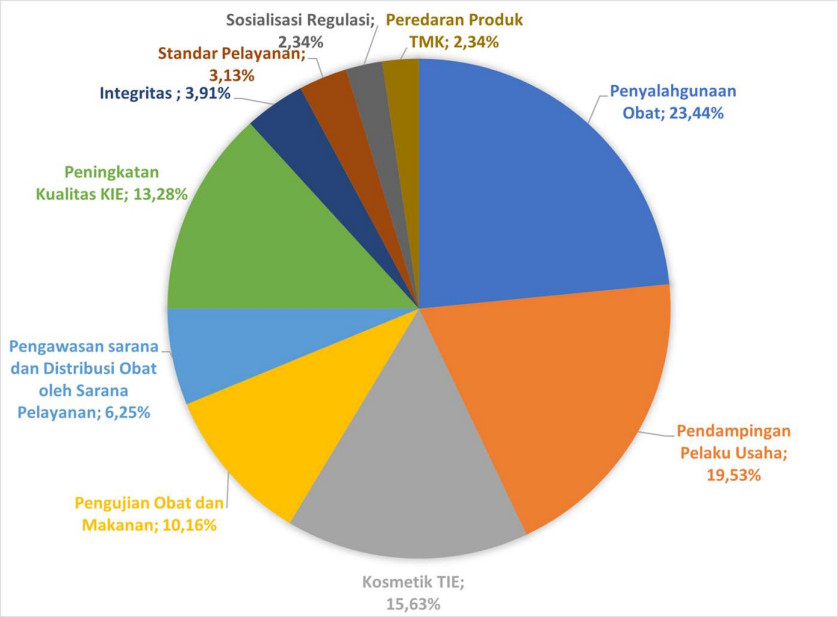

Gambar 1.34 Analisis *wordcloud*

Berdasarkan hasil klasterisasi saran dan analisis *word cloud* di atas data disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat yang disampaikan melalui Layanan ULPK, evaluasi kegiatan KIE serta Pelaksanaan Program GERMAS SAPA dalam peningkatan kinerja pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, antara lain:

1. BPOM dapat melakukan pengawasan secara intensif terakit distribusi obat oleh sarana pelayanan dan KIE tentang penyalahgunaan obat.
2. BPOM diharapkan dapat memberikan pendampingan pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual produk lokal.

3. BPOM diharapkan dapat melakukan pengawasan dan KIE tentang peredaran kosmetik ilegal.
4. BPOM dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan KIE melalui penambahan waktu KIE dan bimtek bagi kader Program Prioritas Nasional sehingga kader yang dibentuk dapat memiliki Tingkat pengetahuan dan kemampuan sosialisasi yang lebih baik, penggunaan alat peraga, serta update materi sesuai dengan isu yang relevan.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk obat, makanan, kosmetik, dan produk terkait lainnya yang beredar di masyarakat. Selama periode 2020–2024, BBPOM di Gorontalo telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam pengawasan dan pelayanan publik. Namun, di balik capaian tersebut, terdapat sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, permasalahan yang perlu diselesaikan, serta tantangan yang harus dihadapi agar kinerja lembaga ini dapat terus meningkat. BBPOM di Gorontalo perlu untuk mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi dalam rangka mengoptimalkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Provinsi Gorontalo.

Untuk itu BBPOM di Gorontalo merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh BBPOM di Gorontalo periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal BBPOM di Gorontalo, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk masyarakat.

Analisis SWOT BBPOM di Gorontalo mengidentifikasi empat aspek utama yang memengaruhi kinerja organisasi dalam menjalankan tugas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Hasil analisis ini diharapkan menjadi dasar perencanaan strategis yang lebih efektif dan adaptif, serta mampu meningkatkan kualitas layanan publik BPOM di Gorontalo demi terciptanya pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang lebih baik dan terpercaya, berikut hasil Analisis SWOT:

I.2.1 Kekuatan *(Strengths)*

Potensi BBPOM di Gorontalo mencakup berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan. Potensi ini meliputi sumber daya manusia, teknologi, serta dukungan dari pihak eksternal. Dengan teknologi yang mumpuni, SDM yang berkompeten, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat, BBPOM di Gorontalo memiliki fondasi yang kuat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di masa depan. Berikut adalah kekuatan yang dimiliki:

1. Tata kelola organisasi yang jelas, terpusat, dan selaras dengan regulasi terkini

BBPOM di Gorontalo memiliki kekuatan internal organisasi yang menjadi fondasi utama dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Gorontalo. Kekuatan ini mencakup kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas dan fungsi yang selaras dengan mandat nasional, penerapan standar operasional yang mapan, serta tata kelola organisasi yang mengacu pada regulasi nasional dan standar internasional. Seluruh komponen tersebut berperan sebagai modal organisasi dalam memastikan terlaksananya pengawasan yang berintegritas, profesional, dan berdampak langsung bagi perlindungan masyarakat.

Struktur organisasi BBPOM di Gorontalo ditetapkan secara terpusat sesuai ketentuan BPOM RI sehingga memberikan kepastian mengenai kewenangan, hubungan kerja, dan alur pertanggungjawaban. Kejelasan struktur ini tidak hanya memastikan keseragaman dengan seluruh UPT BPOM di Indonesia, tetapi juga menjamin bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan di tingkat daerah tetap berada dalam satu kerangka tata kelola nasional. Dengan demikian, BBPOM di Gorontalo memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan mandat sebagai institusi tunggal yang berwenang melakukan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

Pembagian tugas pokok pada setiap fungsi di unit kerja telah diatur dengan sangat jelas dan diselaraskan dengan proses bisnis utama BPOM. Penetapan tugas yang terstandar ini menghilangkan potensi tumpang tindih kewenangan dan mendukung akuntabilitas pelaksanaan kinerja. Setiap fungsi yang terdiri dari pemeriksaan, sertifikasi, pengujian, informasi dan komunikasi publik, penindakan, dan tata usaha, memiliki indikator kinerja, keluaran, serta batas kewenangan yang jelas. Hal ini memastikan bahwa seluruh pegawai memahami peran strategisnya dalam mencapai target organisasi serta mendukung integrasi kinerja nasional.

Instrumen tata kelola telah dituangkan dalam bentuk SOP Mikro yang lengkap dan mutakhir sehingga menjadi kekuatan signifikan dalam menjamin konsistensi dan mutu kinerja. SOP ini menjadi panduan yang memastikan pegawai dapat melaksanakan setiap tahapan kegiatan sesuai kaidah teknis dan mutu yang sama. Adanya SOP ini juga memudahkan pelaksanaan audit, evaluasi kinerja, peningkatan mutu, dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Tata kelola organisasi BBPOM di Gorontalo mengikuti perkembangan regulasi nasional dan standar internasional seperti ISO/IEC 17025 pada laboratorium. Kekuatan tata kelola ini memberikan dasar hukum yang kuat, meningkatkan kredibilitas organisasi, dan memastikan setiap proses pengawasan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif. Selain itu, kebijakan penyederhanaan birokrasi turut memperkuat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BBPOM di Gorontalo. Penyederhanaan proses administrasi, pemangkasan alur persetujuan, percepatan layanan internal, dan digitalisasi berbagai layanan pendukung telah mengurangi hambatan birokratis yang sebelumnya memperlambat pengambilan keputusan. Penerapan e-office, sistem tracking layanan pengujian, serta standarisasi proses bisnis lintas bidang juga mempercepat alur kerja dan meningkatkan produktivitas pegawai. Dengan birokrasi yang lebih ringkas, respons organisasi terhadap isu-isu pengawasan menjadi lebih cepat, tepat, dan adaptif terhadap dinamika peredaran produk di masyarakat.

Kenaikan klasifikasi UPT dari Balai menjadi Balai Besar POM di Gorontalo memberikan kekuatan strategis bagi organisasi dalam menjalankan pengawasan obat dan makanan secara lebih komprehensif, efektif, dan berdampak luas. Status Balai Besar menghadirkan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui bertambahnya kewenangan, struktur organisasi yang lebih lengkap, alokasi sumber daya yang lebih

besar, serta penguatan fungsi laboratorium dan penindakan. Dengan klasifikasi ini, BBPOM di Gorontalo memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam melakukan pengawasan berbasis risiko, percepatan respon terhadap kedaruratan pangan dan obat, perluasan layanan laboratorium, penugasan ahli perkara, serta koordinasi lintas sektor di tingkat provinsi maupun nasional. Peningkatan status ini juga memperkuat posisi organisasi sebagai mitra strategis pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo dapat dilaksanakan dengan standar kualitas yang lebih tinggi, cakupan yang lebih luas, dan hasil yang lebih akuntabel.

Tabel 1.1 Struktur Organisasi dalam lima tahun

Struktur Organisasi				
2020	2021	2022	2023	2024
● Kepala UPT ● Kepala Sub Bagian Tata Usaha ● Kepala Seksi ● Kelompok Jabatan Fungsional	●Kepala UPT ●Kepala Sub Bagian Tata Usaha ●Koordinator Kelompok Substansi ●Kelompok Jabatan Fungsional	●Kepala UPT ●Kepala Sub Bagian Tata Usaha ●Koordinator Kelompok Substansi ●Kelompok Jabatan Fungsional	●Kepala UPT ●Kepala Sub Bagian Tata Usaha ●Ketua Tim Kerja Jabatan Fungsional	●Kepala UPT ●Kepala Sub Bagian Tata Usaha ●Ketua Tim Kerja Jabatan Fungsional

2. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berpengalaman

Salah satu kekuatan utama BBPOM di Gorontalo dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan adalah keberadaan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan memiliki pengalaman yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kualitas SDM ini menjadi faktor penting bagi efektivitas pengawasan karena kegiatan pemeriksaan, sertifikasi, pengujian laboratorium, intelijen, penindakan, pengelolaan keuangan, serta komunikasi risiko membutuhkan keahlian teknis yang tinggi dan kemampuan analitis yang kuat.

BBPOM di Gorontalo didukung oleh personil yang telah memiliki latar belakang pendidikan relevan, sertifikasi kompetensi, dan portofolio pengalaman teknis yang

komprehensif. Selain itu, pejabat fungsional di bidang pengawas farmasi dan makanan serta fungsional tertentu di bidang administrasi memiliki keahlian spesifik yang diperoleh melalui pelatihan berjenjang dan pengalaman langsung dalam menangani berbagai kasus strategis di lapangan. Keberadaan SDM lintas bidang ini memungkinkan BBPOM di Gorontalo menjalankan tugas pengawasan secara holistik bersama pelaku usaha sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.

Dalam lima tahun terakhir, kemampuan dan profesionalisme SDM BBPOM di Gorontalo terus meningkat seiring dengan pelaksanaan berbagai program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh pusat, kementerian/lembaga terkait, maupun mitra akademik. Peningkatan kompetensi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis, seperti pelatihan validasi dan verifikasi metode pengujian berbasis instrumentasi modern, audit mutu, penanganan KLB-KP, digitalisasi pengawasan, pengawasan efek samping obat, resistensi antimikroba, pendampingan UMKM, teknik wawancara dan investigasi, serta penyusunan komunikasi risiko berbasis bukti. Penguatan kapasitas ini semakin diperkaya dengan pengalaman operasional SDM dalam berbagai kasus nyata, seperti KLB keracunan pangan, pengawasan produk ilegal, kolaborasi Criminal Justice System, dan pemberdayaan pelaku usaha pangan dalam skala besar di masyarakat.

Tabel 1.2 Jenjang Pendidikan dalam lima tahun

Jenjang	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Diploma	13	12	11	10	8
Sarjana	31	34	38	41	40
Magister	2	1	3	3	6

3. Komitmen pimpinan yang menjadi role model penerapan budaya kerja dan core values ASN dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan

Komitmen kepemimpinan merupakan salah satu kekuatan fundamental BBPOM di Gorontalo dalam menciptakan organisasi yang solid, adaptif, dan berorientasi hasil. Pimpinan BPOM Gorontalo secara konsisten menunjukkan kepemimpinan yang inklusif, visioner, dan berbasis keteladanan, yang tercermin dari budaya kerja sehari-hari dan capaian kinerja organisasi. Kepemimpinan yang kuat ditunjukkan melalui keteladanan dalam integritas dan etika kerja (konsistensi terhadap standar operasional, anti penyalahgunaan wewenang, dan kepatuhan terhadap regulasi

nasional), pemberdayaan pegawai (pelimpahan tugas yang jelas, coaching rutin, pembinaan kinerja, dan dorongan untuk meningkatkan kompetensi), kecepatan pengambilan keputusan terhadap isu strategis (penanganan KLB-KP, pengawasan pangan prioritas, dan operasi penindakan), dan komitmen terhadap inovasi (mendorong digitalisasi layanan, modernisasi laboratorium, dan inovasi komunikasi risiko). Kepemimpinan BBPOM di Gorontalo juga terbukti memperkuat koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Polda Gorontalo, Dinas Kesehatan, Disperindag, Balai Karantina, perguruan tinggi, serta komunitas SAKA POM, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan di tingkat daerah.

Nilai-nilai budaya PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibel, Kompeten, Inovatif, Responsif) dan core values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) telah diinternalisasi dan menjadi pedoman perilaku seluruh pegawai. Penerapan kedua budaya kerja ini diwujudkan melalui komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan kedisiplinan, memperkuat komunikasi antar bidang, serta memberikan ruang bagi inovasi dan peningkatan kompetensi pegawai. Pimpinan juga konsisten mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Gorontalo terkait keamanan obat dan makanan.

Internalisasi budaya kerja PIKKIR dan BerAKHLAK dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti apel internalisasi nilai, penilaian perilaku, deklarasi komitmen integritas, dan kegiatan penguatan zona integritas. Budaya ini telah menjadi pedoman seluruh pegawai dalam bertindak, memberikan pelayanan, dan menyelesaikan tugas sesuai mandat organisasi.

Hasilnya ditunjukkan melalui peningkatan survey ASN BerAKHLAK selama 3 tahun.
2023: 49,3% (paling tinggi unsur kompeten dan kolaboratif)
2024: 53,9% (paling tinggi unsur berorientasi pelayanan)
2025: 67,7% (paling tinggi unsur berorientasi pelayanan)

4. Kapasitas layanan publik BBPOM di Gorontalo yang konsisten memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

BBPOM di Gorontalo memiliki kapasitas layanan publik yang kuat, terpadu, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Gorontalo. Seluruh layanan publik dilaksanakan berdasarkan Standar

Pelayanan (SP) yang telah ditetapkan, yang mencakup kejelasan prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya, dan mekanisme pengaduan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan kenyamanan dalam mengakses layanan. Hal ini juga menjadi bukti komitmen BBPOM di Gorontalo dalam memberikan layanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berstandar nasional.

Kapasitas layanan publik BBPOM di Gorontalo meliputi berbagai jenis layanan inti, yaitu layanan permintaan informasi publik, sertifikasi produk, sertifikasi sarana produksi/distribusi, serta layanan pengujian laboratorium terhadap produk obat, obat tradisional, kosmetik, pangan, dan bahan berbahaya. Layanan yang lengkap, berbasis standar nasional, dan penggunaan sistem digitalisasi menjadikan BBPOM di Gorontalo sebagai rujukan utama bagi pelaku usaha, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta masyarakat dalam memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar.

BBPOM di Gorontalo juga merupakan satu-satunya laboratorium pemerintah di Provinsi Gorontalo yang memiliki kewenangan melakukan pengujian barang bukti kasus narkotika, obat ilegal, minuman beralkohol, dan perkara keamanan pangan, sehingga menjadi mitra strategis bagi Kepolisian Daerah Gorontalo dan Badan Narkotika Nasional dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara di pengadilan. Selain itu, BBPOM di Gorontalo menyediakan layanan uji laboratorium untuk kepentingan penelitian, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindag, pelaku usaha skala UMKM maupun industri, serta akademisi. Kemampuan laboratorium ini memperkuat jejaring ilmiah dan mendukung peningkatan kualitas produk lokal.

Dalam upaya memperluas akses layanan, BBPOM di Gorontalo bekerja sama dengan Pemerintah Daerah membuka loket layanan publik di Mall Pelayanan Publik (MPP). Kehadiran layanan BPOM di MPP mempercepat proses perizinan dan konsultasi bagi pelaku usaha, sekaligus mendukung implementasi kebijakan nasional mengenai integrasi layanan publik satu pintu. Selain itu, BBPOM di Gorontalo menjalin kerja sama erat dengan Pemerintah Provinsi dalam pemberdayaan pelaku usaha, termasuk pendampingan peningkatan mutu produk, penerapan cara produksi yang baik (CPPOB/CPKB), serta fasilitas pemberian izin edar. Kolaborasi ini secara nyata mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui penguatan daya saing produk UMKM lokal.

BBPOM di Gorontalo memiliki sarana dan prasarana layanan yang lengkap, meliputi ruang pelayanan publik yang ramah pengguna, laboratorium kimia dan mikrobiologi terakreditasi, ruang konsultasi dan pengaduan, serta fasilitas digital yang mendukung kelancaran pelayanan. Petugas layanan telah dibekali pelatihan frontliner dan pelayanan prima, sehingga mampu memberikan layanan yang cepat, empatik, informatif, dan solutif. BBPOM di Gorontalo juga memastikan aksesibilitas layanan bagi kelompok rentan melalui berbagai kanal layanan, seperti layanan daring, hotline, helpdesk, media sosial resmi, serta penyediaan materi informasi dalam format yang lebih mudah dipahami.

BBPOM di Gorontalo memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi Program Presiden Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan peserta didik di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Gorontalo. Salah satu bentuk dukungan konkret BBPOM di Gorontalo terhadap program MBG adalah melalui inspeksi dan pemastian Sarana Produksi Pangan Bergizi (SPPG) telah memenuhi prinsip sanitasi dan higiene, penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), serta pengelolaan bahan baku dan proses produksi yang terstandar. BBPOM di Gorontalo juga melaksanakan pengujian kimia dan mikrobiologi produk MBG. Selain itu, BBPOM di Gorontalo juga melakukan pendampingan teknis dan pembinaan kepada sekolah, pengelola dapur, dan penyedia bahan baku untuk memastikan mereka memahami standar keamanan pangan yang harus diterapkan dalam seluruh rantai produksi dan penyajian MBG. Pendampingan ini berkontribusi langsung pada peningkatan kapasitas pelaku MBG dan meminimalkan risiko kejadian keracunan pangan di sekolah. Sebagai bagian dari jejaring pengawasan nasional, BBPOM di Gorontalo juga aktif berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga pendukung lainnya dalam melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap program MBG.

Data pelatihan SPPG: 19 SPPG

Jumlah pemeriksaan SPPG: 6 SPPG

Pengujian MBG: 18 SPPG

Kapasitas layanan yang kuat ini terbukti mampu menjawab kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor, baik dalam bentuk konsultasi, penjaminan mutu produk, maupun dukungan penyidikan. Seiring dengan

meningkatnya kebutuhan pengawasan pangan dan obat di daerah serta adanya perluasan kanal layanan melalui MPP dan platform digital, jumlah pengguna layanan publik BBPOM di Gorontalo menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan BBPOM di Gorontalo dan keberhasilan organisasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang relevan, mudah diakses, dan memberi dampak nyata bagi perlindungan kesehatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 1.3 Jumlah Layanan dalam lima tahun

Jenis Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Permintaan Informasi	79	208	79	69	73
Sertifikasi	3	9	15	7	21
Pengujian	260	323	363	328	294

Tabel 1.4 Capaian Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat

2020	2021	2022	2023	2024
102,78	102,74	100,71	103,32	101,01

5. Dukungan infrastruktur sebagai komitmen dalam memberikan kontribusi kinerja pengawasan secara maksimal

BBPOM di Gorontalo memiliki infrastruktur dan fasilitas yang menjadi salah satu kekuatan utama organisasi dalam menjalankan mandat pengawasan obat dan makanan di wilayah Provinsi Gorontalo. BBPOM di Gorontalo sebagai satu-satunya lembaga pemerintah di provinsi ini yang memiliki kapasitas laboratorium pengujian lengkap, sarana pendukung pengawasan yang modern, serta lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat maupun mitra lintas sektor.

Secara geografis, BBPOM di Gorontalo menempati lokasi yang strategis dan mudah dijangkau, berada di pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi provinsi. Lokasinya berada di jalur utama kota, dekat dengan fasilitas umum seperti rumah sakit, dinas kesehatan, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan. Keunggulan akses ini mempermudah mobilitas petugas dalam melakukan pengawasan lapangan,

mempercepat respon terhadap kejadian luar biasa keracunan pangan, serta memudahkan pelaku usaha dan masyarakat mengakses layanan publik yang disediakan.

Dari sisi infrastruktur gedung, BBPOM di Gorontalo memiliki fasilitas bangunan yang representatif, aman, dan memenuhi standar pelayanan publik, termasuk ruang layanan terpadu, ruang konsultasi, ruang rapat koordinasi lintas sektor, serta area penerimaan sampel. Ruang layanan publik dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan, dilengkapi dengan jalur ramah disabilitas, ruang tunggu yang tertata baik, serta sistem antrian yang jelas. Hal ini menjadikan BBPOM di Gorontalo sebagai salah satu lembaga dengan sarana pelayanan publik paling lengkap di provinsi ini.

Tabel 1.5 Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)

2020	2021	2022	2023	2024
3,83	4,11	4,02	4,81	4,96

Keunggulan paling signifikan terletak pada fasilitas laboratorium kimia dan mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025, menjadi satu-satunya laboratorium pemerintah di Gorontalo yang mampu melakukan pengujian komprehensif terhadap obat, obat tradisional, kosmetik, pangan olahan, bahan berbahaya, serta uji barang bukti untuk mendukung penegakan hukum. Laboratorium ini dilengkapi instrumen modern seperti spektrofotometer, HPLC/UPLC, GC-MS, ICPMS, BSC, LAF, inkubator mikrobiologi, dan berbagai peralatan validasi serta verifikasi metode yang diperlukan untuk pengujian presisi tinggi. Keberadaan fasilitas ini tidak hanya mendukung pengawasan rutin, tetapi juga memberikan nilai strategis sebagai mitra utama Kepolisian Daerah Gorontalo dan BNN dalam pengujian barang bukti serta pemberian keterangan ahli di pengadilan.

Tabel 1.6 Pemenuhan standar peralatan laboratorium

2020	2021	2022	2023	2024
66,2	66,8	70,2	73,1	73,3

Gambar 1.35 Grafik Pemenuhan Alat Laboratorium

Selain itu, BBPOM di Gorontalo menyediakan infrastruktur pendukung digital yang memperkuat tata kelola dan layanan publik, seperti aplikasi tracking layanan pengujian, sistem penerimaan sampel berbasis elektronik, kanal konsultasi dan aduan daring, serta integrasi layanan di Mall Pelayanan Publik (MPP). Pengembangan sistem digital ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memonitor layanan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi biaya transaksi layanan publik. Penerapan digitalisasi juga digunakan dalam pelaksanaan operasional internal untuk penataan ketertiban administrasi misalnya pengelolaan persuratan, keuangan, pemetaan risiko, dan pelaporan.

Dari sisi sarana operasional, BBPOM di Gorontalo memiliki kendaraan operasional pengawasan, peralatan sampling terstandar, perangkat komunikasi darurat, serta sarana mobilitas yang memadai untuk mendukung pengawasan di berbagai wilayah kabupaten/kota. Fasilitas ruang penyimpanan sampel, cold storage, ruang preparasi, serta sistem pemantauan suhu dan kelembaban juga menjadi faktor pembeda penting karena memastikan seluruh pengujian dilakukan sesuai kaidah ilmiah dan standar keamanan laboratorium. Ketersediaan fasilitas ini memberikan keunggulan signifikan dalam respons cepat terhadap isu-isu keamanan pangan, termasuk kejadian keracunan, temuan produk ilegal, dan investigasi perkara.

Tabel 1.7 Data peningkatan jumlah unit aset peralatan dan mesin

2020	2021	2022	2023	2024
-	1370	1372	1412	1462

Sebagai lembaga teknis pusat, BBPOM di Gorontalo juga mendapat dukungan peralatan dan pembaruan teknologi secara berkelanjutan melalui penyediaan APBN yang memungkinkan pemutakhiran instrumen laboratorium, perbaikan sarana, serta peningkatan infrastruktur digital. Dengan keunggulan lokasi strategis, fasilitas layanan publik lengkap, laboratorium berstandar internasional, sarana operasional yang memadai, serta dukungan infrastruktur digital yang modern, BBPOM di Gorontalo menjadi lembaga yang memiliki kapasitas tertinggi dalam pengawasan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo. Kekuatan infrastruktur ini memastikan organisasi mampu memberikan respon cepat, akurat, transparan, dan profesional terhadap kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, dan mitra penegak hukum, sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis pengamanan obat dan makanan dalam lima tahun ke depan.

6. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengelolaan keuangan yang akuntabel merupakan salah satu kekuatan utama BBPOM di Gorontalo dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab menjaga kesehatan masyarakat melalui pengawasan yang efektif, BBPOM di Gorontalo memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara dikelola secara transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip value for money. Komitmen terhadap akuntabilitas ini tidak hanya tercermin dalam kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara, tetapi juga dalam implementasi sistem monitoring, pencatatan, dan pelaporan yang dapat diaudit serta dapat dipertanggungjawabkan setiap saat.

Pengelolaan keuangan di BBPOM di Gorontalo dilakukan secara sistematis melalui serangkaian tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan keuangan. Tahapan tersebut mengacu pada peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan kebijakan internal BPOM RI, sehingga

seluruh proses berjalan dalam kerangka tata kelola keuangan yang baku dan seragam secara nasional. Perencanaan anggaran dilakukan berbasis kinerja dengan mempertimbangkan kebutuhan riil operasional pengawasan, prioritas nasional, serta target kinerja tahunan. Hal ini memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar mendukung capaian output dan outcome organisasi.

BBPOM di Gorontalo juga berkomitmen memperkuat tata kelola organisasi melalui digitalisasi pengelolaan keuangan. Transformasi ini menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan organisasi. Pemanfaatan aplikasi dan sistem keuangan berbasis digital seperti SAKTI, SAS, OMSPAN, e-Monev, dan e-Rekon-LK memungkinkan proses perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, dan pelaporan dilakukan secara terintegrasi, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Penggunaan sistem-sistem tersebut memastikan bahwa setiap transaksi keuangan memiliki jejak audit yang jelas (audit trail), sehingga meminimalkan potensi penyimpangan dan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban.

Tabel 1.8 Data Peningkatan Anggaran DIPA

2020	2021	2022	2023	2024
13.166.952.000	18.722.057.000	19.564.795.000	20.845.116.000	20.289.582.000

Digitalisasi keuangan juga mendukung monitoring realisasi anggaran secara real time, sehingga pimpinan dan pengelola keuangan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Selain itu, proses revisi anggaran, penatausahaan, hingga rekonsiliasi dapat dilakukan lebih efektif karena seluruh dokumen dan verifikasi dilakukan secara elektronik. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan efisiensi kerja, pengurangan beban administratif manual, dan percepatan layanan kepada pegawai maupun mitra kerja. Tidak hanya pada sistem internal, digitalisasi juga diterapkan dalam pengadaan barang dan jasa melalui platform SIRUP, SPSE, dan e-Kontrak, yang memastikan proses pengadaan lebih transparan dan kompetitif. Seluruh proses pengadaan dipublikasikan melalui SIRUP sehingga dapat diakses publik sebagai bentuk keterbukaan informasi. Publik dapat memantau pengumuman

dan progres pengadaan, sehingga meningkatkan keterbukaan informasi dan kepercayaan terhadap organisasi.

Penguatan akuntabilitas juga diwujudkan melalui pembinaan dan pengawasan internal yang ketat, termasuk evaluasi anggaran rutin, reviu dokumen pertanggungjawaban, pendampingan teknis bendahara, dan penerapan SPIP dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan. Kegiatan pembinaan ini memastikan bahwa setiap pegawai yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan memahami kewajiban, batas kewenangan, dan risiko yang harus dihindari dalam penggunaan anggaran negara.

Kinerja positif BBPOM di Gorontalo dalam pengelolaan keuangan turut memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Realisasi anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan konsisten dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata bahwa organisasi memiliki tata kelola keuangan yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas keuangan yang baik juga berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan karena anggaran dapat diarahkan secara optimal pada aktivitas prioritas seperti pengujian laboratorium, operasi pengawasan, edukasi publik, dan dukungan terhadap program nasional seperti MBG.

7. Reputasi organisasi yang kuat dan diakui secara luas

BBPOM di Gorontalo memiliki reputasi institusional yang kuat dan diakui secara luas, baik di tingkat daerah maupun nasional. Reputasi ini terbentuk dari konsistensi pencapaian kinerja, integritas organisasi, serta keberhasilan dalam menjalankan peran strategis pengawasan obat dan makanan. Berbagai penghargaan, akreditasi, dan pencapaian prestasi yang diraih menjadi bukti bahwa BBPOM di Gorontalo adalah lembaga yang kredibel, dipercaya, dan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perlindungan masyarakat dan pembangunan daerah.

Salah satu pencapaian penting adalah predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang pernah diraih BBPOM di Gorontalo. Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen organisasi dalam membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik. Dengan predikat tersebut, BBPOM di Gorontalo menjadi role model pelayanan

publik di sektor kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap integritas organisasi.

BBPOM di Gorontalo juga memiliki rekam jejak reputasi yang kuat dalam mendukung penanganan kesehatan masyarakat, termasuk ketika menjadi salah satu laboratorium pemeriksa COVID-19 yang berperan penting dalam percepatan deteksi kasus selama masa pandemi. Kontribusi ini memperlihatkan kesiapan laboratorium, kompetensi SDM, dan keandalan sarana prasarana yang dimiliki BBPOM di Gorontalo, yang tidak dimiliki oleh banyak instansi daerah lainnya.

Dalam aspek inovasi, BBPOM di Gorontalo meraih penghargaan Juara Nasional Inovasi Berdampak melalui program INGO A+, sebuah inovasi yang memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan ekonomi daerah serta percepatan penurunan stunting. Inovasi ini meningkatkan kapasitas UMKM pangan melalui pendampingan mutu, sekaligus mempercepat akses masyarakat terhadap pangan aman dan bergizi. Penghargaan tersebut memperkuat citra organisasi sebagai lembaga yang adaptif, kreatif, dan mampu menciptakan solusi strategis bagi permasalahan kesehatan masyarakat.

Dari sisi tata kelola keuangan, BBPOM di Gorontalo secara konsisten memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menggambarkan integritas dan akuntabilitas organisasi dalam pengelolaan anggaran negara. Capaian ini memberikan legitimasi tambahan bahwa BBPOM di Gorontalo adalah organisasi yang dapat dipercaya dan memiliki tata kelola yang responsif serta efektif.

Reputasi BBPOM di Gorontalo semakin kuat dengan keberhasilan memperoleh berbagai akreditasi internasional, seperti ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu, ISO 17025 untuk kompetensi laboratorium pengujian, dan ISO 37001 untuk Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Ketiga akreditasi ini menunjukkan bahwa organisasi telah memenuhi standar global dalam pelayanan publik, pengujian laboratorium, dan integritas kelembagaan. Keunggulan ini menjadikan BBPOM di Gorontalo sebagai instansi yang sangat kredibel di mata masyarakat, pelaku usaha, lembaga pemerintah, dan mitra internasional.

Di bidang penegakan hukum, jejaring Criminal Justice System (CJS) yang dimiliki BBPOM di Gorontalo menjadi kekuatan signifikan. BBPOM berhasil membangun sinergi yang solid dengan Polda Gorontalo, Kejaksaan, dan BNN, serta mencatatkan prestasi sebagai PPNS terbaik dalam penanganan perkara obat dan makanan. Kinerja

ini memperkuat posisi organisasi sebagai otoritas yang kompeten dalam mendukung penyidikan dan penindakan hukum terhadap pelanggaran peredaran obat dan makanan yang membahayakan masyarakat.

Dalam keuangan, BBPOM di Gorontalo juga pernah dinobatkan sebagai pengelola Kartu Kredit Pemerinta (KKP) terbaik, menunjukkan kemampuan organisasi dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan negara dengan efektif dan efisien. Reputasi BBPOM di Gorontalo semakin diperkaya dengan predikat sebagai perintis SAKA POM di seluruh Indonesia, menunjukkan komitmen kuat dalam pembinaan generasi muda peduli obat dan makanan. Peran ini tidak hanya memperluas jangkauan edukasi publik, tetapi juga memperkuat citra organisasi sebagai agen perubahan yang aktif di masyarakat.

Rangkaian penghargaan dan rekognisi tersebut menjadikan BBPOM di Gorontalo sebagai lembaga yang dihormati dan disegani dalam berbagai forum nasional maupun daerah. Reputasi yang kuat mempermudah koordinasi, advokasi kebijakan, dan sinergi lintas sektor, karena instansi pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat luas memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kredibilitas organisasi. Kekuatan reputasi ini merupakan aset strategis yang mendukung pencapaian tujuan pengawasan obat dan makanan serta pelaksanaan program-program prioritas pemerintah di masa mendatang.

(Tren data aspek positif/penghargaan setiap tahun)

1. WBK 2020
2. WBBM 2024
3. Laboratorium Pemeriksa Covid-19 PPKM Award 2023
4. Inovasi Pemanfaatan minuman keras Cap Tikus sebagai bahan baku Hand Sanitizer 2020 (Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 Kategori Cepat Tanggap) dari Menpan RB
5. Inovasi Layanan Publik PKRI INGO A+ 2024
6. Pengelola KKP terbaik (2022-2023)
7. Pelayanan Publik Informatif
8. PPNS terbaik 2020-2025 (Polda)

I.2.2 Kelemahan *(Weaknesses)*

Permasalahan yang dihadapi BBPOM di Gorontalo selama periode ini mencakup keterbatasan tenaga ahli, alat laboratorium yang usang, alokasi anggaran yang belum efisien, dan digitalisasi pengawasan yang belum optimal. Jika permasalahan ini tidak diatasi dengan serius, maka efektivitas pengawasan dan pelayanan publik akan terus terhambat. Secara rinci kelemahan BBPOM di Gorontalo, antara lain:

1. Sumber daya operasional yang kurang memadai. Walaupun teknologi canggih tersedia, kurangnya pemeliharaan berkala dan alokasi anggaran yang tidak efektif menjadi penghambat utama. Dalam aspek pelaksanaan teknis pengawasan, sumber daya berupa anggaran sangat memegang peran penting dalam upaya pembinaan kepada pelaku usaha. Semakin intens kunjungan onsite dalam rangka pembinaan ke sarana maka pembinaan dan pendampingan dapat lebih efektif dilakukan. Adanya pemblokiran beberapa anggaran juga memberikan dampak yang signifikan terhadap lambatnya pengawasan di lapangan. Demikian halnya dalam hal KIE, peningkatan kompetensi bagi petugas, dan pemenuhan sarana dan prasarana layanan publik, sumber daya anggaran sangat diperlukan.
2. Distribusi beban kerja yang tidak merata. Terutama dapat mengakibatkan kelelahan pada personil laboratorium dan ketidakseimbangan kapasitas SDM untuk pelayanan publik serta pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Berdasarkan analisis beban kerja, idealnya BBPOM di Gorontalo membutuhkan **sekitar 81 pegawai** untuk melaksanakan tugas pengawasan dengan optimal. Namun, per data Desember 2025, jumlah pegawai aktual hanya 66 pegawai. SDM yang tersedia kurang dari 85% dari kebutuhan ideal (66 vs 81), menunjukkan ada kekurangan personil yang cukup besar.
3. Kesenjangan kompetensi petugas. Peningkatan kompetensi petugas di setiap fungsi masih belum optimal karena belum semua petugas memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai dengan standar pemeriksaan, terutama kompetensi inspektur, intelijen dan juga kompetensi petugas dalam pengawasan iklan. Penilaian kompetensi ini mengacu pada standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017. Masih adanya *gap* kompetensi tersebut menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi pegawai secara lebih

terarah dan berkelanjutan, guna mendukung pencapaian visi BPOM sebagai lembaga pengawas yang andal dan terpercaya.

4. Kondisi geografis Provinsi Gorontalo masih memiliki banyak wilayah yang sulit untuk dijangkau oleh mobil laboratorium keliling. Akses jalan yang terbatas ke wilayah terpencil, topografi berbukit dan medan ekstrem sehingga berdampak pada kualitas pengambilan sampel, kecepatan pengujian, serta efektivitas penanganan KLB pangan.
5. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung pengawasan. Perangkat IT seperti laptop, camera, printer masih terbatas. Infrastruktur jaringan dan internet masih tidak stabil di beberapa titik, sangat menghambat proses pelaporan dan penginputan data *real time* ke sistem nasional. Fasilitas laboratorium yang kurang lengkap atau usang menjadi batasan dalam melakukan analisis yang kompleks atau sensitif, mengurangi kemampuan laboratorium untuk mengidentifikasi kontaminan dan memverifikasi keamanan produk.
6. Digitalisasi pengawasan belum optimal. Implementasi e-reporting dan digital e-monitoring terganggu oleh koneksi internet yang tidak stabil dan perangkat IT yang tidak update mengakibatkan perlaporan data real time tidak selalu akurat dan integrasi dengan sistem pusat tidak optimal.
7. Pelaksanaan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya mengikuti perencanaan awal dapat menimbulkan berbagai hambatan dalam pencapaian target kinerja. Beberapa kegiatan dilaksanakan tanpa berpedoman ketat pada dokumen perencanaan dan analisis kebutuhan yang kuat, akibatnya terdapat perubahan pada tahap pelaksanaan kegiatan. Selain itu, rendahnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala dan kurangnya sinkronisasi antara unit teknis dan tim keuangan mengakibatkan revisi anggaran yang terlambat, pelaksanaan kegiatan menunggu penyesuaian ulang sehingga menyebabkan keterlambatan realisasi.

I.2.3 Peluang *(Opportunities)*

Dengan memanfaatkan potensi ini secara optimal, BBPOM Gorontalo memiliki peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat proses sertifikasi, dan memastikan produk yang beredar di masyarakat aman serta sesuai standar. Namun, optimalisasi potensi ini memerlukan perencanaan strategis yang

matang serta sinergi yang kuat antara internal lembaga dan para pemangku kepentingan eksternal. Beberapa peluang yang dapat digunakan dalam strategi efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan oleh BBPOM di Gorontalo adalah:

1. Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo

   PDRB Provinsi Gorontalo pada triwulan III-2025 mencapai Rp14.997,21 miliar atas dasar harga berlaku dan Rp8.821,93 miliar atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 5,49% (y-on-y) pada periode ini, menempatkannya di peringkat ketujuh pertumbuhan ekonomi nasional tertinggi untuk triwulan III-2025 (Sumber BPS Provinsi Gorontalo). Kenaikan aktivitas perdagangan dan jasa ini membuka peluang bagi Balai Besar POM untuk memperluas pengawasan produk pangan olahan, distribusi obat dan kosmetik khususnya pada rantai distribusi yang meningkat aktivitasnya. Data PDRB triwulan dan tahunan juga membantu menentukan prioritas alokasi sampling dan inspeksi.

Gambar 1.36 10 Provinsi dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi

2. Petumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Masyarkat Digital (IMDI) Provinsi Gorontalo

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator komposit yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama:

kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Kenaikan IPM Provinsi Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan meningkatnya derajat kesehatan, akses pendidikan, serta kemampuan ekonomi penduduk, yang sekaligus mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan dan obat yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam analisis SWOT, tren kenaikan IPM ini menjadi peluang bagi BBPOM di Gorontalo, karena peningkatan kualitas masyarakat mendorong kesadaran dan permintaan yang lebih tinggi terhadap keamanan obat dan Makanan, memperluas ruang kolaborasi lintas sektor, serta memperkuat dukungan publik terhadap pengawasan yang lebih modern, edukatif, dan berbasis risiko sesuai tugas dan fungsi BPOM.

Sementara Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, IMDI Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 adalah 44,21 lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan lebih baik dari nilai IMDI Nasional walau pun masih dalam kategori cukup.

Gambar 1.37 Distribusi Nilai IMDI

Indeks Masyarakat Digital yang terus meningkat menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif menggunakan teknologi, media sosial, dan layanan digital dalam mencari informasi, bertransaksi, serta berinteraksi dengan pemerintah. Bagi BBPOM di Gorontalo, kondisi ini menjadi peluang penting karena meningkatnya literasi digital membuka ruang lebih luas untuk penguatan edukasi publik, kampanye keamanan pangan dan obat secara online, serta percepatan pelayanan berbasis digital seperti pengaduan, informasi produk, dan pelaporan kejadian tidak diinginkan. Selain itu, masyarakat digital yang semakin kritis dan

terhubung mendorong BBPOM untuk memanfaatkan analitik media sosial, pemantauan daring, dan sistem informasi modern untuk memperkuat deteksi dini risiko, meningkatkan transparansi, serta memperluas jangkauan pengawasan secara lebih efektif dan efisien.

Kenaikan IPM dan IMDI Provinsi Gorontalo secara simultan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya semakin sehat, berpendidikan, dan memiliki tingkat hidup yang lebih baik, tetapi juga semakin digital, terhubung, dan kritis dalam mengakses informasi. Kombinasi kedua indikator ini memberikan dorongan strategis bagi peningkatan kinerja BBPOM di Gorontalo ke depan. Masyarakat yang lebih maju secara sosial dan digital cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya keamanan pangan dan obat, sehingga memperbesar peluang BBPOM untuk memperluas edukasi publik, memperkuat pengawasan berbasis pelibatan masyarakat, serta meningkatkan efektivitas layanan pengaduan dan informasi produk melalui kanal digital. Di sisi lain, meningkatnya literasi digital memungkinkan BBPOM memanfaatkan teknologi—mulai dari sistem intelijen siber, analisis tren media sosial, hingga aplikasi pengawasan—untuk mendeteksi risiko lebih cepat dan menjangkau wilayah pengawasan lebih luas. Dengan demikian, kenaikan IPM dan IMDI menjadi fondasi peluang yang kuat bagi BB POM di Gorontalo untuk bertransformasi menuju pengawasan yang lebih adaptif, responsif, dan modern.

3. Kolaborasi Pentahelix dan Sinergi dengan Pemerintah Daerah

Gambar 1.38 *The Penthahelix Strategy*

Pendekatan kolaboratif pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media menjadi peluang strategis untuk memperkuat ekosistem pengawasan obat dan makanan. Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Gorontalo memiliki program prioritas yang sejalan dengan tugas BBPOM di Gorontalo, seperti peningkatan ketahanan pangan, penanggulangan stunting, dan pemberdayaan UMKM. Hal ini membuka ruang sinergi lintas program yang saling mendukung. BBPOM di Gorontalo dapat memanfaatkan momentum tersebut untuk memperluas jejaring kemitraan, membangun mekanisme koordinasi yang berkesinambungan, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan partisipatif (community-based surveillance). Selain itu, sinergi dengan media lokal dapat memperkuat strategi komunikasi risiko dan memperluas jangkauan edukasi publik.

Sampai tahun 2025 Balai Besar POM telah melahirkan berbagai output hasil kolaborasi seperti Inovasi INGO A+ yang merupakan inovasi BPOM di Gorontalo dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Gorontalo. INGO A+ merupakan minyak kelapa kampung yang ditambahkan Vitamin A didalamnya. Minyak kelapa kampung dipilih sebagai salah satu produk yang ditambahkan vitamin A dikarenakan tingkat konsumsi minyak kelapa kampung di Gorontalo tinggi. Masyarakat Gorontalo menggunakan minyak kelapa kampung pada campuran masakan khas Gorontalo.

Dengan dukungan riset perguruan tinggi, kebijakan Pemda, kemampuan implementasi pelaku usaha, dan keterlibatan aktif komunitas, BBPOM di Gorontalo akan dapat menciptakan layanan yang lebih cepat, terukur, dan adaptif terhadap kebutuhan daerah sehingga inovasi yang lahir dari kolaborasi pentahelix ini memberikan dampak nyata berupa meningkatnya kesadaran keamanan pangan dan obat, menurunnya temuan produk berisiko, serta meningkatnya kualitas pelayanan bagi masyarakat Gorontalo. Selain teknologi, sumber daya manusia yang kompeten dan profesional menjadi aset penting. Sebagian besar tenaga di BBPOM Gorontalo telah memiliki sertifikasi dan keterampilan di bidang laboratorium dan pengawasan. Melalui program pelatihan rutin dan pengembangan kapasitas, potensi SDM ini dapat semakin ditingkatkan. Komitmen pimpinan dalam meningkatkan pelayanan publik juga menjadi kekuatan signifikan yang mendorong berbagai inisiatif strategis.

I.2.4 Ancaman *(Threats)*

Ancaman yang dihadapi BBPOM Gorontalo selama periode ini sebagian besar berasal dari faktor eksternal, termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan tenaga ahli, dan masuknya produk ilegal yang semakin marak. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur dan tantangan koordinasi dengan instansi terkait menambah kompleksitas masalah yang dihadapi. Beberapa ancaman yang dapat menghambat tercapainya kinerja pengeawasan obat dan makanan BBPOM di Gorontalo diantaranya:

1. Peningkatan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal

   Peredaran obat dan makanan ilegal di Provinsi Gorontalo menunjukkan kecenderungan meningkat seiring berkembangnya pola distribusi yang semakin kompleks. Akses fisik Gorontalo yang terbuka melalui jalur darat dari provinsi lain di Pulau Sulawesi menjadikan wilayah ini rentan menjadi tujuan distribusi produk ilegal yang dibawa menggunakan kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun jasa ekspedisi tanpa rantai dokumen yang jelas. Pola peredaran seperti ini menyulitkan penelusuran asal barang maupun identifikasi pelaku.

   Di sisi lain, praktik penjualan melalui media sosial dan platform e-commerce semakin mendominasi. Transaksi digital dengan metode pembayaran melalui dompet elektronik, rekening penampung, atau sistem *cash on delivery* (COD) mengakibatkan jejak transaksi tidak mudah ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam pembuktian perkara, serta memperbesar potensi peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

   Laporan Tahunan BBPOM di Gorontalo Tahun 2024 mencatat keberadaan 961 sarana kosmetik terdaftar, namun pengawasannya belum mencakup keseluruhan pelaku usaha di lapangan, sehingga ruang peredaran produk ilegal masih signifikan. Situasi ini menciptakan ancaman serius bagi upaya pengendalian risiko kesehatan masyarakat, serta dapat menghambat pencapaian penurunan peredaran produk obat dan makanan ilegal di wilayah Gorontalo.

2. Lemahnya Ekosistem Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik serta Keterbatasan Penanggung Jawab Teknis

   Ekosistem industri Obat Bahan Alam (OBA) dan kosmetik di Provinsi Gorontalo masih belum berkembang secara optimal. Meskipun jumlah UMKM meningkat

signifikan—dari 82.732 unit pada tahun 2023 menjadi 105.509 unit pada tahun 2024 (meningkat 28%), mayoritas pelaku usaha masih bergerak di sektor makanan olahan tradisional dan kerajinan. Sementara itu, pelaku usaha di bidang OBA dan kosmetik jumlahnya masih sangat terbatas dan sebagian belum memenuhi standar produksi yang baik.

Keterbatasan Penanggung Jawab Teknis (PJT) menjadi kendala utama. Tenaga farmasi atau personel kompeten di bidang formulasi dan mutu produk lebih banyak terserap di fasilitas pelayanan kefarmasian, sehingga ketersediaannya untuk sektor industri sangat terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan CPKB/CPOTB serta menyusun formula yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu.

Laporan Tahunan BBPOM di Gorontalo tahun 2023 mencatat 782 sarana kosmetik, meningkat menjadi 961 pada tahun 2024. Namun, peningkatan jumlah sarana belum sejalan dengan peningkatan standar keamanan dan legalitas produk. Lemahnya ekosistem industri legal dan keterbatasan SDM teknis ini menghambat upaya peningkatan daya saing produk lokal dan memperbesar ketergantungan pada produk luar daerah, termasuk yang berpotensi ilegal.

3. Tekanan Ekonomi dan Tingginya Tingkat Kemiskinan yang Berdampak pada Kepatuhan Pelaku Usaha

   Kondisi sosial ekonomi Gorontalo menjadi salah satu faktor struktural yang berdampak pada efektivitas pengawasan obat dan makanan. Data BPS Tahun 2025 menunjukkan persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo mencapai 13,24% atau sekitar 162.740 jiwa. Angka tersebut meskipun mengalami penurunan dari 13,87% pada September 2024, tetap berada pada level yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Selain itu, disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan sangat signifikan, yakni 4,68% di perkotaan dan 20,80% di pedesaan.

   Situasi ekonomi tersebut berdampak terhadap perilaku produksi dan konsumsi. Pelaku usaha mikro dan kecil cenderung melakukan efisiensi biaya produksi yang dapat mengurangi perhatian terhadap standar keamanan dan mutu produk. Kenaikan harga bahan baku, biaya logistik, dan biaya pengemasan dalam beberapa tahun terakhir—ditambah inflasi daerah yang fluktuatif dan sempat

mencapai 2,88% (Maret 2025) mendorong sebagian pelaku usaha memilih bahan baku murah atau dan dapat mempengaruhi mutu dan keamanan produk.

Dari sisi konsumen, keterbatasan daya beli mendorong preferensi terhadap produk murah yang sering kali tidak memiliki izin edar. Kondisi ini menciptakan pasar yang rentan terhadap peredaran produk ilegal, dan berdampak langsung pada keberhasilan program pengawasan serta perlindungan konsumen.

4. Penyebaran Hoaks dan Rendahnya Literasi Keamanan Obat dan Makanan

   Tingginya penggunaan internet dan media sosial di Gorontalo merupakan peluang sekaligus ancaman. Berdasarkan data BPS, 94,25% rumah tangga di Gorontalo pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir. Sementara itu, survei tahun 2023 menunjukkan 86,74% remaja usia 10–19 tahun menggunakan internet, dengan 64,94% di antaranya menggunakan media sosial untuk berinteraksi dan memperoleh informasi.

   Namun tingginya akses digital tidak diiringi dengan literasi informasi yang memadai. Sebagian besar masyarakat masih kesulitan membedakan informasi valid dan tidak valid terkait obat, pangan, dan kosmetik. Hal ini menyebabkan penyebaran hoaks terkait kandungan bahan pangan, keamanan obat dan kosmetik, atau klaim produk herbal yang berlebihan tersebar luas dan memengaruhi perilaku konsumsi.

   Di tengah keterbatasan infrastruktur informasi di beberapa daerah pedesaan, masyarakat seringkali tidak memperoleh edukasi keamanan pangan dan obat dari kanal resmi. Kondisi ini memperbesar peluang masyarakat mengkonsumsi dan menggunakan produk ilegal atau tidak terstandarisasi, sehingga menjadi ancaman bagi efektivitas program edukasi dan perlindungan konsumen yang dijalankan BBPOM di Gorontalo.

5. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha. Meskipun terdapat peningkatan jumlah sarana obat dan makanan yang terdaftar, kepatuhan pelaku usaha terhadap hasil pengawasan BBPOM di Gorontalo masih menjadi tantangan. Rendahnya pemahaman pelaku usaha terutama usaha mikro terhadap regulasi keamanan produk dan kewajiban perizinan menyebabkan sebagian besar pelaku usaha belum siap untuk dilakukan pemeriksaan sarana.

   Sebagian pelaku usaha memandang pengawasan sebagai proses yang rumit, memerlukan biaya tambahan, atau dapat mengganggu operasional mereka. Hal

ini menyebabkan sebagian pelaku usaha menolak pemeriksaan atau menghindari legalisasi. Jika kepatuhan terhadap pemeriksaan sarana tidak meningkat, maka upaya peningkatan keamanan dan mutu produk menjadi sulit dicapai. Rendahnya kesiapan pelaku usaha untuk memenuhi standar juga berpotensi meningkatkan jumlah temuan pelanggaran di lapangan, dan menghambat pencapaian indikator pengawasan yang telah ditetapkan oleh BPOM.

6. Keterbatasan Kewenangan Penyidik dan Ketergantungan pada Aparat Penegak Hukum Eksternal

   Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan sangat dipengaruhi oleh kemampuan penyidik dalam melaksanakan tugas. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBPOM di Gorontalo tidak memiliki kewenangan penahanan, sehingga proses penyidikan memerlukan dukungan Kepolisian. Keterbatasan kapasitas dan prioritas kepolisian di daerah dapat menunda proses penindakan, penggeledahan, atau pengamanan barang bukti.

   Dalam konteks Provinsi Gorontalo yang memiliki luas wilayah dengan distribusi penduduk yang tersebar, penundaan proses penyidikan memberikan peluang bagi pelaku untuk menghilangkan barang bukti atau melanjutkan kegiatan ilegal. Kondisi ini mengurangi efek jera bagi pelaku usaha dan menghambat penyelesaian perkara secara cepat dan efektif. Keterbatasan tersebut menjadi ancaman terhadap pencapaian sasaran penurunan peredaran produk ilegal dan peningkatan efektivitas penindakan hukum di Provinsi Gorontalo.

7. Belum Optimalnya Perlindungan Pelapor dan Saksi

   Perlindungan terhadap pelapor dan saksi merupakan komponen penting dalam penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Namun, belum optimalnya mekanisme perlindungan di tingkat daerah menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait pelanggaran. Kekhawatiran akan intimidasi, tekanan sosial, maupun potensi gangguan hubungan bisnis membuat masyarakat enggan melapor. Minimnya laporan dari masyarakat mengakibatkan banyak kasus peredaran ilegal tidak terungkap hingga akar permasalahan. Upaya pengawasan lebih banyak bergantung pada temuan petugas di lapangan, yang cakupannya terbatas. Kondisi ini memperlambat pengungkapan jaringan distribusi ilegal dan melemahkan efektivitas penegakan hukum.

8. Tingginya Preferensi Konsumen terhadap Produk Murah dan Tidak Terstandarisasi

   Preferensi masyarakat terhadap produk berharga rendah menjadi faktor yang mempengaruhi stabilitas perdagangan obat dan makanan di Provinsi Gorontalo. Produk ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan obat sering kali dijual dengan harga lebih murah karena tidak menanggung biaya izin edar, pengujian mutu, dan standar produksi. Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang terbatas, produk-produk ini menjadi pilihan alternatif bagi sebagian besar konsumen. Preferensi ini terbentuk karena kombinasi antara kondisi ekonomi, kurangnya literasi konsumen, dan tingginya paparan iklan menyesatkan di media sosial. Jika tidak diimbangi dengan edukasi, ketersediaan produk aman, dan intervensi pasar yang tepat, maka pola konsumsi terhadap produk ilegal akan sulit dikendalikan. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis BBPOM di Gorontalo dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan bermutu.

   Langkah Strategis yang dapat di tempuh yaitu peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, pengalokasian anggaran yang lebih optimal untuk pemeliharaan laboratorium dan pengadaan alat baru, edukasi publik secara lebih masif untuk meningkatkan kesadaran konsumen, penyusunan pedoman teknis yang lebih fleksibel dan mudah diimplementasikan di daerah.

   Dengan mengatasi ancaman-ancaman ini, BBPOM di Gorontalo dapat meningkatkan efektivitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta membangun kepercayaan masyarakat yang lebih kuat.

Tabel 1.9 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strengths	***Weaknesses***
1. Tata kelola organisasi yang jelas, terpusat, dan selaras dengan regulasi terkini 2. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berpengalaman 3. Komitmen pimpinan yang menjadi role model penerapan budaya kerja dan core values ASN dalam pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan 4. Kapasitas layanan publik BBPOM di Gorontalo yang konsisten memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 5. Dukungan infrastruktur sebagai komitmen dalam memberikan kontribusi kinerja pengawasan secara maksimal 6. Pengelolaan keuangan yang akuntabel 7. Reputasi organisasi yang kuat dan diakui secara luas	1. Sumber daya operasional yang kurang memadai 2. Distribusi beban kerja yang tidak merata 3. Kesenjangan kompetensi petugas 4. Kondisi geografis Provinsi Gorontalo masih memiliki banyak wilayah yang sulit untuk dijangkau oleh mobil laboratorium keliling 5. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung pengawasan 6. Digitalisasi pengawasan belum optimal 7. Pelaksanaan realisasi anggaran yang tidak sepenuhnya mengikuti perencanaan awal
Opportunities	***Threats***
1. Pertumbuhan Ekonomi Regional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Gorontalo 2. Petumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Masyarkat Digital (IMDI) Provinsi Gorontalo 3. Kolaborasi Pentahelix dan Sinergi dengan Pemerintah Daerah	1. Peningkatan Peredaran Obat dan Makanan Ilegal 2. Lemahnya Ekosistem Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik serta Keterbatasan Penanggung Jawab Teknis 3. Tekanan Ekonomi dan Tingginya Tingkat Kemiskinan yang Berdampak pada Kepatuhan Pelaku Usaha 4. Penyebaran Hoaks dan Rendahnya Literasi Keamanan Obat dan Makanan 5. Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha 6. Keterbatasan Kewenangan Penyidik dan Ketergantungan pada Aparat Penegak Hukum Eksternal 7. Belum Optimalnya Perlindungan Pelapor dan Saksi 8. Tingginya Preferensi Konsumen terhadap Produk Murah dan Tidak Terstandarisasi

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

II.1 Visi BPOM 2025-2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

II.2 Misi BPOM 2025-2029

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

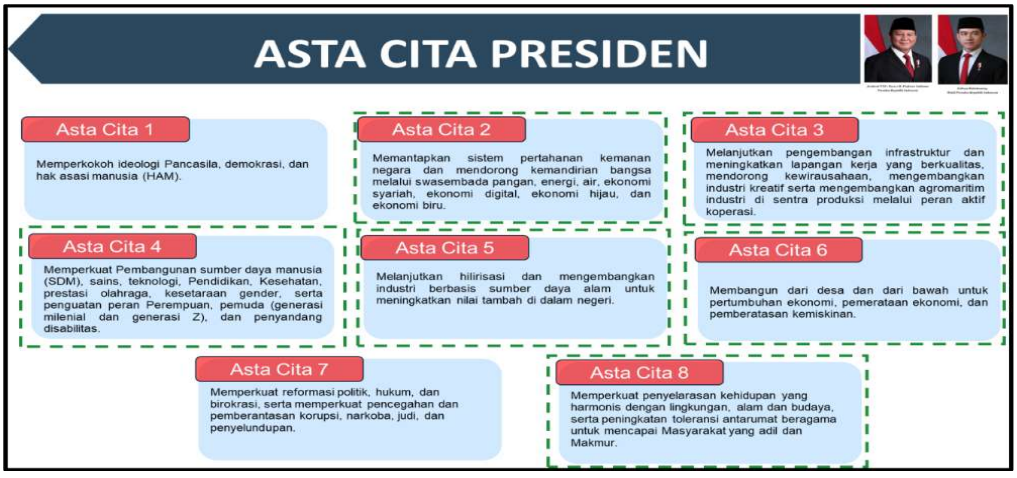

Gambar 2.1. Asta Cita Presiden

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8.

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Misi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

   Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

   BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya

struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

   Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

   Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

BBPOM di Gorontalo sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM

II.3 Tujuan BPOM 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk

periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar dipasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa- 89 -dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang

berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. BBPOM di Gorontalo sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM

No	Tujuan	Indikator	Terget				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74,75	76,4	77,75	79,45	80,7
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,2	88,6	88,9	89,2	89,4
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,6	66,2	69,3	72,7	76,7
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,4	75,9	77,1	78,5	79,9
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,3	96,35	96,4	96,45	96,5

II.4 Sasaran Kegiatan BBPOM di Gorontalo

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai BBPOM di Gorontalo, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan BBPOM di Gorontalo akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
c. Jumlah desa pangan aman
d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT

BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
b. Nilai AKIP UPT BPOM
c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai Besar POM di Gorontalo periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* 1. *Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu* 2. *Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)* 3. *Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)* 4. *Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 5. *Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT *Indikator:* 1. *Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 2. *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* 3. *Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 4. *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar* 5. *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 6. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder* 7. *Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		6. *Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan*	*8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* *11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan* *12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar* *13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT* *14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* *15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman* 16. *Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)*
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	*Indikator:* *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT*
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar*
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM *Indikator:* *Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan*	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan*	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu *Indikator:* *Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan*

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Farmasi dan Pangan Olahan		
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya efektivitas KIE *Indikator:* 1. *Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT* 2. *Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* 3. *Jumlah desa pangan aman* 4. *Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas*
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Layanan Publik UPT yang prima *Indikator:* *Indeks Pelayanan Publik UPT*
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal *Indikator:* 1. *Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM* 2. *Nilai AKIP UPT BPOM* 3. *Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM* 4. *Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM*

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pemahaman terbatas pelaku usaha terhadap standar keamanan produk	Melaksanakan program edukasi dan sosialisasi intensif mengenai standar keamanan produk, seperti standar halal, jaminan produk halal sesuai UU No. 33 Tahun 2014, dan prinsip keamanan pangan lainnya kepada pelaku usaha terutama UMKM	Tim infokom, Tim Pemeriksaan
			Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih dan mengonsumsi produk farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan terdaftar resmi oleh BPOM untuk mengurangi risiko konsumsi produk ilegal atau berbahaya	Tim Infokom, Tim Sertifikasi
			Meningkatkan jumlah dan peran kader pangan aman di desa dan komunitas untuk mengedukasi warga tentang praktik higiene, cara membaca label keamanan produk, serta risiko produk kadaluarsa atau palsu	Tim Infokom
			Melakukan pengawasan ketat dan sampling produk secara rutin di pasar tradisional dan modern untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan pangan dan farmasi	Tim Penindakan, Tim Pemeriksaan, Tim Pengujian

2	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Variasi demografi dan budaya di wilayah kerja yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penerimaan pesan KIE, menuntut pendekatan yang berbeda dan adaptif	Melakukan survei dan evaluasi berkala untuk memahami efektivitas KIE di setiap wilayah kerja dan melakukan penyesuaian strategi sesuai hasil yang diperoleh	Tim Infokom
			Mengembangkan media komunikasi yang variatif, termasuk media lokal tradisional dan media digital, agar dapat menjangkau berbagai kelompok demografi dengan gaya komunikasi yang sesuai	Tim Infokom, Tim Sertifikasi
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Terbatasnya kapabilitas dan sumber daya ekonomi dari pelaku UMKM terkait standar keamanan pangan dan farmasi sehingga pembinaan memerlukan pendekatan yang intensif dan berkelanjutan	Memfasilitasi akses pembiayaan dan modal usaha, termasuk kemitraan dengan lembaga keuangan mikro dan pemerintah daerah, sehingga UMKM dapat mengembangkan kapasitas produksi dan memperbaiki fasilitas produksi sesuai standar	Tim Infokom
			Mengembangkan sistem inkubasi usaha yang memberikan dukungan teknis, pemasaran, dan pengembangan produk berbasis potensi lokal untuk meningkatkan daya saing dan mutu produk UMKM	Tim Infokom, Tim Sertifikasi
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Keterlibatan lintas sektor dalam penanganan kasus kejahatan obat dan makanan memang menyebabkan kompleksitas yang tinggi, yang dapat memperpanjang proses hukum dan menghasilkan vonis yang rendah, sehingga	Memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor melalui forum komunikasi dan koordinasi intelijen serta siber, membangun kesamaan pemahaman dan strategi antar pemangku kepentingan, meningkatkan kapasitas forensik digital penyidik	Tim Penindakan

		kurang memberikan efek jera bagi pelaku		
5	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Market penjualan obat dan makanan ilegal yang sangat luas dan kemudahan akses bagi masyarakat melalui berbagai platform, terutama e-commerce dan penjualan daring, menjadi faktor utama yang memperparah kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	Memperkuat regulasi dan kerja sama dengan platform e-commerce dan marketplace untuk melakukan pemblokiran akun dan penghapusan produk ilegal;	Tim Penindakan
			Menerapkan sistem pengawasan pre-market dan post-market yang terintegrasi meliputi sertifikasi, inspeksi, sampling, dan pengujian produk untuk memastikan keamanan dan mutu produk yang beredar	Tim Penindakan
6	Layanan Publik UPT yang Prima	Konsistensi pelayanan prima perlu dipertahankan pada BBPOM di Gorontalo yang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai wujud komitmen untuk menjaga integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, serta memastikan kepuasan dan perlindungan	Dapat dilakukan dengan menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen Mutu yang sesuai dengan standar internasional ISO/IEC 17025:2017 dan ISO 9001:2015	Tim Mutu, Tim MR, Bagian Tata Usaha, Tim ZI
			Pelaksanaan kaji ulang manajemen secara rutin, audit internal berkala, peningkatan kompetensi SDM, serta pemeliharaan proses yang efektif dan efisien secara berkelanjutan.	Tim Mutu, Tim MR, Bagian Tata Usaha, Tim ZI

		konsumen; hal ini dilakukan dengan menjalankan sistem manajemen mutu, inovasi pelayanan digital, penguatan kompetensi SDM, tata kelola yang transparan, serta evaluasi dan monitoring berkala guna menghindari penurunan standar pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi	Evaluasi sasaran mutu tahunan, penerapan inovasi dalam layanan publik, penguatan tata kelola yang transparan, serta monitoring dan perbaikan berkelanjutan untuk menghindari penurunan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan masyarakat	Tim Mutu, Tim MR, Bagian Tata Usaha, Tim ZI
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Penyesuaian dan restrukturisasi organisasi UPT BPOM yang perlu terus dilakukan untuk menyesuaikan dinamika kebutuhan pengawasan dan peningkatan layanan publik sesuai regulasi terbaru, seperti Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur struktur dan tata kerja	Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi perubahan untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala operasional; memperkuat koordinasi lintas unit dan dengan pemangku kepentingan eksternal untuk menjaga kesinambungan fungsi pengawasan; serta menyesuaikan sistem dan prosedur kerja dengan regulasi terbaru guna menjaga efektivitas dan kualitas pelayanan pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah kerja	Bagian Tata Usaha, Tim ZI

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Startegis BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

   Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta

penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan

Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data

7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

III. 2 Arah Kebijakan dan Kebijakan Startegis BBPOM di Gorontalo

Arah kebijakan dan strategi BBPOM di Gorontalo disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis (SWOT) yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di wilayah kerja. Penyesuaian ini dilakukan agar arah kebijakan unit tidak hanya selaras dengan strategi BPOM 2025–2029, tetapi juga responsif terhadap isu spesifik di wilayah kerja BBPOM di Gorontalo. BBPOM di Gorontalo mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-postmarket* dengan mendorong inovasi untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan keberpihakan pada UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Strategi pengawasan BBPOM di Gorontalo pada periode 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat serta meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal melalui pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis risiko. Dengan memanfaatkan kekuatan kelembagaan seperti laboratorium

berstandar ISO 17025, jejaring lintas sektor yang kuat, serta integritas dan kompetensi SDM, strategi pengawasan disusun untuk menjawab tantangan eksternal berupa meningkatnya peredaran produk ilegal, pesatnya transaksi digital, rendahnya literasi keamanan pangan dan obat, serta dinamika industri pangan olahan dan sediaan farmasi yang semakin kompleks.

Strategi BBPOM di Gorontalo 2025-2029 dalam mendukung pencapaian kebijakan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan adalah sebagai berikut:

1. **Penguatan pengawasan *pre-* dan *post-market* melalui inovasi yang responsif terhadap perkembangan risiko dan teknologi.**

   BBPOM di Gorontalo akan mengoptimalkan sistem pengawasan berbasis data, meningkatkan efektivitas sampling berbasis risiko, serta mendorong penguatan dan peningkatan kapasitas laboratorium untuk mengantisipasi ancaman keamanan, termasuk pada produk pangan lokal di festival budaya dan produk farmasi yang berpotensi disalahgunakan. Penguatan ini juga mencakup pemanfaatan SPBE, digitalisasi layanan, serta integrasi data lintas sektor guna memastikan pengawasan yang cepat, akurat, dan adaptif terhadap modus pelanggaran baru. Selain melakukan pengawasan rutin, BBPOM di Gorontalo juga secara proaktif menjalankan pengawasan terhadap program nasional MBG melalui pelatihan, pengujian, dan pemeriksaan SPPG sehingga tidak hanya reaktif saat terjadi KLB KP tetapi juga mendukung pencegahan risiko insiden/KLB KP. Pengelolaan risiko insiden/KLB KP yang efektif akan menjamin keberlangsungan program MBG, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045, sesuai dengan program presiden yang tertuang asta cita.

2. **Penguatan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, khususnya yang terjadi melalui jalur digital maupun distribusi konvensional.**

   Dengan memanfaatkan kekuatan jejaring CJS yang selama ini berjalan efektif, BBPOM di Gorontalo akan memperluas kapasitas intelijen pengawasan, meningkatkan kemampuan penelusuran rantai distribusi, serta membangun pola deteksi dini terhadap peredaran produk ilegal melalui e-commerce dan

media sosial. Strategi ini menjadi krusial untuk menghadapi ancaman berupa distribusi obat palsu, produk ilegal lintas daerah, serta penjualan gelap melalui metode pembayaran yang sulit dilacak. Pendekatan preventif diperkuat melalui early warning system berbasis hasil uji laboratorium dan informasi intelijen.

3. **Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha, terutama UMKM.**

   Memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah daerah terkait pemberdayaan UMKM serta tingginya kebutuhan sertifikasi produk, BBPOM di Gorontalo akan memperluas pembinaan secara sistematis, meningkatkan kemudahan akses informasi regulasi, dan menyediakan pendampingan teknis yang lebih intensif dalam proses pemenuhan standar mutu dan keamanan. Strategi ini tidak hanya memperbaiki kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga bertujuan mengurangi tingkat pelanggaran akibat ketidaktahuan aturan dan keterbatasan kapasitas. Dukungan laboratorium yang handal menjadi kekuatan penting dalam mendukung percepatan kematangan produk UMKM lokal.

4. **Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.**

   Strategi BBPOM di Gorontalo dalam peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan meliputi peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan Obat dan Makanan melalui kampanye dan promosi, penggunaan media sosial dan media massa untuk menyampaikan informasi tentang keamanan Obat dan Makanan, menyediakan informasi yang akurat dan transparan tentang keamanan Obat dan Makanan, membuat publikasi tentang hasil pengawasan dan tindakan penindakan, mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keamanan Obat dan Makanan, mengembangkan materi edukasi yang sesuai untuk berbagai kelompok masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui program pelaporan dan pengawasan bersama dan mengoptimalkan kerja sama dengan organisasi masyarakat dan lembaga lain untuk meningkatkan

peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

5. **Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Gorontalo.**

   Kolaborasi lintas sektor yang selama ini menjadi kekuatan Balai Besar POM Gorontalo akan dioptimalkan melalui kerja sama teknis dengan pemerintah daerah, instansi penegak hukum, lembaga pendidikan, dan sektor privat dalam mendukung pengawasan berbasis risiko. Kerja sama yang relevan dengan peningkatan keamanan pangan, pengujian laboratorium, serta transformasi digital juga akan diadaptasi untuk menjawab kebutuhan daerah. Pendekatan kolaboratif ini menjadi penting untuk mengatasi keterbatasan SDM, infrastruktur, serta kesenjangan digital yang teridentifikasi dalam analisis SWOT.

6. **Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital.**

   Mengingat adanya kesenjangan kompetensi SDM teknis dan meningkatnya beban kerja, BBPOM di Gorontalo akan berfokus pada peningkatan kapasitas pegawai pengawasan, inspektur, analis, dan penyidik melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi, magang teknis, dan kerja sama pendidikan. Di sisi laboratorium, peningkatan ruang lingkup uji, keandalan peralatan, serta pemeliharaan terencana menjadi strategi kunci untuk memastikan mutu hasil uji yang akurat dan mendukung berbagai layanan publik dan penegakan hukum. Transformasi digital akan diarahkan pada pengembangan dashboard pengawasan, digitalisasi proses bisnis, serta pelayanan informasi yang lebih cepat dan mudah diakses.

7. **Penguatan dukungan manajemen untuk memastikan seluruh proses pengawasan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.**

   BBPOM di Gorontalo akan memperkuat tata kelola anggaran, manajemen risiko, sistem mutu, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk menjamin keberlanjutan layanan publik. Penguatan budaya kerja PIKKIR dan 5S serta peningkatan kualitas layanan publik yang telah mencapai kategori Pelayanan Prima menjadi landasan untuk mempertahankan reputasi

kelembagaan sekaligus menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat dan profesional.

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategis BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan pre- dan post-market melalui inovasi yang responsif terhadap perkembangan risiko dan teknologi.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Penguatan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, khususnya yang terjadi melalui jalur digital maupun distribusi konvensional
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha, terutama UMKM
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Gorontalo
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Penguatan dukungan manajemen untuk memastikan seluruh proses pengawasan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi satker BBPOM di Gorontalo juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Berikut kegiatan dan program BBPOM di Gorontalo 2025-2029

a. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

   Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, BBPOM di Gorontalo melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia". Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Gorontalo mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

b. Kegiatan pengeloaan sarana dan prasarana BPOM

   Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja pegawai, serta pelaksanaan pemeliharaan rutin sebagai bagian integral dari upaya mendukung kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh BBPOM di Gorontalo. Pengelolaan BMN mencakup perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pelaporan aset negara agar tetap dalam kondisi optimal untuk mendukung operasional satuan kerja. Melalui pengelolaan yang tertib, efisien, dan transparan, BBPOM di Gorontalo berupaya memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki dapat digunakan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan di lapangan.

   Di sisi lain, pengelolaan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan, merupakan komponen penting dalam menjaga kesejahteraan serta motivasi sumber daya manusia yang menjadi ujung tombak pelaksanaan tugas pengawasan. SDM yang kompeten dan sejahtera menjadi faktor penentu dalam memastikan mutu dan keamanan Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat.

Selain itu, kegiatan pemeliharaan rutin terhadap fasilitas kantor, laboratorium, kendaraan operasional, serta peralatan pengujian dilakukan secara berkesinambungan guna menjamin kelancaran pelaksanaan pengawasan dan pelayanan publik. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang terawat dengan baik, BBPOM di Gorontalo dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, cepat, dan akurat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini menjadi fondasi penting bagi BBPOM di Gorontalo dalam menjaga keberlanjutan kinerja organisasi. Dukungan terhadap aspek administratif dan operasional ini berkontribusi langsung pada peningkatan kapasitas lembaga dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Target kinerja BBPOM di Gorontalo merupakan ukuran atau standar yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan atau sasaran kegiatan BPOM dalam suatu periode rencana strategis. BBPOM di Gorontalo menyusun matriks kerangka kinerja periode 2025 – 2029, yang memuat sasaran kegiatan yang menggambarkanvisi misi dan Indikator Kinerja Utama serta target-target yang akan dicapai dalam rangka melindungi peredaran produk farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja BBPOM di Gorontalo.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran kegiatan yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih BPOM selama periode lima tahun.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85,75	87	88,25	89,50	90,75
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
			Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	88	89	90	91
			Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
			Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93,01	93,50	94	94,50	95

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91,5	93	94,5	96
	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94	95,25	96,5	97,75	99,50
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	89,10	90,70	92,30	93,80	95
	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar	85	86	87	88	89

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
			Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
			Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	65,1	69,2	72,8	76,5	80
			Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota pangan aman	16,67	33,33	50	66,67	83,33
			Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)	-	81	82	83	84
2	Meningkatnya efektivitas KIE		Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,82	90,72	91,62	92,51	93,41
			Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	7	12	13	14	15

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
			Jumlah desa pangan aman	3	6	7	7	7
			Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	2
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	16,07	30,36	46,43	62,50	82,14
4	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	96	97	98	99
5	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi		Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT							
6	Layanan Publik UPT yang prima		Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
7	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91,97	96,09	96,3	96,51	96,72
			Nilai AKIP UPT BPOM	80,10	81,00	81,50	82,00	82,50
			Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
			Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,00	4,00	4,20	4,30	4,44

IV.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan BBPOM di Gorontalo 2024-2029 disusun untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah tersebut. Pendanaan akan difokuskan pada empat pilar utama: penguatan infrastruktur laboratorium modern, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, digitalisasi sistem pengawasan untuk efisiensi operasional, serta kampanye edukasi dan sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan pengelolaan dana dapat lebih transparan, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan kesehatan dan keselamatan publik di Gorontalo

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan BBPOM di Gorontalo Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	7.305,788	6.477,543	7.125,297	7.837,827	8.621,610
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	7.519,135	7.894,416	8.683,858	9.552,243	10.507,468
TOTAL	14.824,923	14.371,959	15.809,155	17.390,070	19.129,078

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan BBPOM di Gorontalo Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	13.714,716	13.261,752	14.587,927	16.046,720	17.651,392
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1.110,207	1.110,207	1.221,228	1.343,350	1.477,686
TOTAL	14.824,923	14.371,959	15.809,155	17.390,070	19.129,077

BAB V

PENUTUP

Renstra BBPOM di Gorontalo 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPOM.

Renstra BBPOM di Gorontalo 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra BPOM secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI GORONTALO TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Gorontalo									**14.824,923**	**14.371,959**	**15.809,155**	**17.390,070**	**19.129,078**	UPT BPOM
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									**7.305,788**	**6.477,543**	**7.125,297**	**7.837,827**	**8.621,610**	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		Balai Besar POM di Gorontalo											UPT BPOM
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		85,75	87	88,25	89,5	90,75						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO		26	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87	88	89	90	91						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		80	82	84	87	90						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		93,01	93,5	94	94,5	95						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		90	91,5	93	94,5	96						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		91	92	93	94	95						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		94	95,25	96,5	97,75	99,5						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		90	91	92	93	94						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan		89,1	90,7	92,3	93,8	95						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar		85	86	87	88	89						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT		100	100	100	100	100						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		65,1	69,2	72,8	76,5	80						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman		16,67	33,33	50	66,67	83,33						UPT BPOM
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	81	82	83	84						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans			45	45	45	45	45						
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT			308	308	308	308	325						
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT			711	719	758	797	838						
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			26	40	44	47	52						
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			502	617	664	716	771						
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM			204	204	204	216	216						
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia			2	0	0	0	0						
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			1	0	0	0	0						
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			12	0	0	0	0						
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar			0	283	283	283	283						
	Meningkatnya efektivitas KIE		Balai Besar POM di Gorontalo											UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		89,82	90,72	91,62	92,51	93,41						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		7	12	13	14	15						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	3	Jumlah desa pangan aman		3	6	7	7	7						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		1	1	1	1	2						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE			474	500	600	720	864						
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT			20	10	11	12	13						
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan			7	12	13	14	15						
	RO 4: Desa Pangan Aman			3	6	7	7	7						
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas			1	1	1	1	2						
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		Balai Besar POM di Gorontalo											UPT BPOM
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		16,07	30,36	46,43	62,5	82,14						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT			9	10	11	12	14						
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Balai Besar POM di Gorontalo											UPT BPOM
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT		85	96	97	98	99						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan			4	4	4	4	4						
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Balai Besar POM di Gorontalo											UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar		90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT			14	14	15	15	15						
	Layanan Publik UPT yang prima		Balai Besar POM di Gorontalo											UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT		4,7	4,75	4,8	4,85	4,9						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT			203	216	222	226	229						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Balai Besar POM di Gorontalo											UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM		91,97	96,09	96,3	96,51	96,72						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2	Nilai AKIP UPT BPOM		80,1	81	81,5	82	82,5						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM		5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM		3	4	4,2	4,3	4,44						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan			1	1	1	1	1						
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia			1	1	1	1	1						
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi			1	1	1	1	1						
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									**7.519,135**	**7.894,416**	**8.683,858**	**9.552,243**	**10.507,468**	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"			1	1	1	1	1						UPT BPOM